



# **PETA RENCANA SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1. Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan .....	3
1.4. RUANG LINGKUP .....	4
BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE .....	5
2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sumatera Barat .....	5
2.1.1 Visi SPBE .....	5
2.1.2 Misi SPBE.....	5
2.1.3. Tujuan SPBE.....	6
2.1.4. Sasaran SPBE .....	6
2.2. Arah Kebijakan Strategi SPBE Provinsi Sumatera Barat .....	6
2.2.1 Tujuan Jangka Panjang .....	7
2.2.2 Tujuan Jangka menengah.....	8
2.3. Sasaran Strategis SPBE Provinsi Sumatera Barat .....	9
2.3.1. Tata kelola SPBE .....	10
2.3.2. Layanan SPBE .....	12
2.3.3. TIK .....	13
2.3.4. SDM SPBE .....	14
2.4. Evaluasi dan Penilaian SPBE.....	17
BAB III KONDISI AKTUAL PROVINSI SUMATERA BARAT .....	22
3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2019.....	22
3.2. Kondisi Aktual Penerapan SPBE .....	22

3.2.1. Organisasi Perangkat Daerah.....	24
3.2.2. Kebijakan.....	27
3.2.3. Tata Kelola TIK.....	27
3.2.4. Infrastruktur Jaringan.....	29
3.3. Visi, Misi dan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Barat.....	34
BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT.....	35
4.1. Target SPBE Provinsi Sumatera Barat .....	35
4.2. Target Sasaran Strategis Per Domain SPBE.....	38
BAB V ANALISA KESENJANGAN .....	41
5.1. Analisa Kesenjangan .....	41
5.2. Meta Model Peta Rencana.....	41
5.3. Keterpaduan Unsur SPBE .....	43
5.4 Keterkaitan SPBE dan SDI ( Satu Data Indonesia ) .....	44
5.5. Komponen Peta Rencana SPBE .....	45
BAB VI PERCEPATAN SPBE SUMATERA BARAT .....	47
BAB VII PETA RENCANA SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT .....	48
7.1. Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat ( 2022 – 2026 ).....	50
BAB VIII DETAIL RENCANA PROYEK PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN SPBE.....	59
BAB IX PENUTUP .....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Nilai Indeks SPBE.....	18
Tabel 2. Karakteristik Level Indeks SPBE.....	19
Tabel 3. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE .....	20
Tabel 4. Kondisi Aktual Penerapan SPBE .....	23
Tabel 5. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK.....	27
Tabel 6. Tata Kelola TIK di Provinsi Sumatera Barat .....	28
Tabel 7. Daftar Alokasi Bandwidth Internet di masing-masing OPD .....	30
Tabel 8. Target Kematangan Kebijakan Internal SPBE Provinsi Sumatera Barat .....	35
Tabel 9. Target Kematangan Manajemen SPBE Provinsi Sumatera Barat .....	36
Tabel 10. Target Tingkat Kematangan Layanan SPBE .....	37
Tabel 11. Target Tata Kelola SPBE.....	38
Tabel 12. Target Layanan SPBE .....	38
Tabel 13. Target Kesiapan TIK .....	39
Tabel 14. Target Kesiapan SDM SPBE .....	40
Tabel 15. Layanan Publik Terpadu SPBE .....	42
Tabel 16. Tematik Layanan SPBE Provinsi Sumatera Barat.....	43
Tabel 17. Daftar Langkah Strategis Pelaksanaan SPBE dalam Perspektif Komponen SPBE.....	46
Tabel 18. Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat ( 2022 – 2026 ).....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Milestone Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	7
Gambar 2. Fase Arah Strategis SPBE.....	8
Gambar 3. Empat Pilar Pembangunan SPBE.....	9
Gambar 4. Keterkaitan Enam Arsitektur SPBE.....	10
Gambar 5. Struktur Organisasi Tim Koordinasi SPBE.....	11
Gambar 6. Standar Kompetensi SDM Teknis SPBE.....	15
Gambar 7. Sertifikasi Kompetensi SDM.....	16
Gambar 8. Evaluasi Indeks SPBE.....	17
Gambar 9. Bobot Nilai Indeks SPBE.....	18
Gambar 10. Indikator dan Data Dukung Evaluasi Indeks SPBE.....	21
Gambar 11. Empat Kategori Pengembangan SPBE Provinsi Sumatera Barat.....	38
Gambar 12. Meta Model Komponen Penyusun SPBE Provinsi Sumatera Barat.....	41
Gambar 13. Keterpaduan Unsur SPBE.....	43
Gambar 14. Keterkaitan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI).....	44
Gambar 15. Langkah Penyiapan dan Pelaksanaan SPBE di Provinsi Sumatera Barat.....	45
Gambar 4. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE.....	48

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Era globalisasi ternyata datang lebih cepat , kondisi kondisi seperti adanya pasar bebas, isu demokrasi, isu Hak Asasi Manusia, isu korupsi, society 5.0, industri 4.0, open government dan *good corporate governance* , menjadi perhatian negara termasuk Indonesia untuk dapat berinteraksi dengan negara lain. Saat kondisi tersebut telah terjadi negara lain, dan di Indonesia belum terjadi, maka tentu saja akan berdampak pada pergaulan dunia dan keterasingan. Pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (*supply side*), maka saat ini bergeser ke arah masyarakat (*demand side*), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya menjadi semakin tinggi .

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menyebabkan orang dapat berinteraksi langsung tanpa perantara , kemudahan dalam mengakses data dan informasi, sehingga tuntutan masyarakat akan layanan yang mudah, murah, cepat dan bagus karena adanya teknologi menjadi multak. Masyarakat dengan mudah membanding suatu layanan dari negara lain atau institusi lain, masyarakat dengan mudah berkomentar di sosial media jika ada layanan yang kurang bagus dan menjadi viral. Tentu saja dampak teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa saat ini harus bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri seperti media informasi, model pendidikan serta kesehatan karena adanya teknologi ini.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang ekonomi , seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu *digital marketplace*. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah :

1. Globalisasi yang menuntut pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini
2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah
3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

Maka Sistem Pemerintan Berbasis Elektronik ( SPBE ) adalah jawaban atas segala kondisi yang ada, terkait penyelenggaran pemerintahan saat ini.

## 1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
18. Peraturan Presiden no. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )
19. Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ( SDI )

20. Peraturan Menteri PANRB no.19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri PANRB no.5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.
22. Peraturan Menteri PANRB no. 59 tahun 2020 Tentang Pemantaun dan Evaluasi SPBE
23. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (Kerangka SPBE)
2. Solusi Pentahapan Pengembangan (Arah Strategis SPBE)
3. Rencana proyek implementasi 5 tahun (Rencana Aksi SPBE)

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arah kebijakan strategis pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Tersedianya acuan langkah penyiapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat yang melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK dan SDM SPBE
3. Tersedianya panduan pelaksanaan SPBE yang melingkupi layanan administrasi pemerintahan terpadu dan layanan publik terpadu



## 1.4. RUANG LINGKUP

### 1. Bab II : VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

### 2. Bab III : KONDISI AKTUAL SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE yang telah ada saat ini, serta visi misi sasaran strategis RPJMD tahun 2018 -2023

### 3. Bab IV : TARGET PENGEMBANGAN SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini menggambarkan tahapan SPBE yang berorientasi pada output Smart Government dan capaian target indeks SPBE

### 4. Bab V : ANALISA KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisa kesenjangan dari setiap domain, aspek dan indikator dari SPBE , berdasarkan kondisi aktual dan target yang akan dicapai.

### 5. Bab VI : PETA RENCANA SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka waktu 2021 – 2025, dengan kelompok Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, SDM SPBE, Audit TIK.

### 6. Bab VII : DETAIL RENCANA PROYEK PERSIAPAN DAN PENERAPAN SPBE

Bab ini memberikan detail tahapan kegiatan dengan kerangka proyek ( ruang lingkup kegiatan , waktu, sumber daya ) serta pemetaan terhadap nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020.

### 7. Bab VIII : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Provinsi Sumatera Barat selama 2022 -2026 yang selaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 -2026.

## BAB II

### VISI MISI DAN SASARAN SPBE

#### 2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sumatera Barat

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi secara proses bisnis. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan kelanjutan dari era *e-Government* menuju *Smart Government*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

##### 2.1.1 Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Provinsi Sumatera Barat selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

**“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”**

##### 2.1.2 Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Provinsi Sumatera Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

### 2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

### 2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

## 2.2. Arah Kebijakan Strategi SPBE Provinsi Sumatera Barat

Dasar arah kebijakan strategi SPBE Sumatera Barat adalah mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE yang semua tertera dalam Perpres no. 95 tahun 2018, ditambahkan dengan langkah percepatan transformasi digital dari Presiden Joko Widodo serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2018 – 2023. Di dalamnya terdapat arah strategi jangka panjang dan jangka menengah.

### 2.2.1 Tujuan Jangka Panjang



Gambar 1. Milestone Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Terdapat 5 buah *milestone* langkah jangka panjang yang terkait dengan Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kerangka transformasi digital pemerintahan.

- 1) Penyederhanaan Birokrasi berbasis Digital ( ***Digital Bureaucracy*** )  
Melakukan langkah yang komprehensif dan menyeluruh mulai dari proses bisnis, organisasi, kebijakan dan SDM, beberapa langkah yang akan dilakukan adalah :
  - a. Percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional
  - b. Percepatan digitalisasi pemerintahan dengan penataan proses bisnis tematik
  - c. *Collaborative working* pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah.
  - d. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
  - e. Penyediaan Sistem Database Manajemen Talenta untuk mendukung reformasi birokrasi yang diarahkan agar terjadi fleksibilitas, mobilitas, dan mutasi ASN berdasarkan kebutuhan dan merit sistem (*mission oriented*).
- 2) Pemulihan Ekonomi melalui manajemen kinerja ( ***Digital Work Management*** )  
Digital Work Management adalah pengelolaan dalam produktivitas dan kolaborasi instansi, memberikan semua orang di organisasi visibilitas, akuntabilitas, dan kontrol yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan sesuatu.

3) Peningkatan Kualitas SDM berbasis digital ( **Digital Mindset** )

Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Pemerintah telah menetapkan ada 4 pilar yaitu Etis Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Cakap Bermedia Digital dan Budaya Bermedia Digital.

4) Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, responsif dan adaptif ( **Digital Government** )

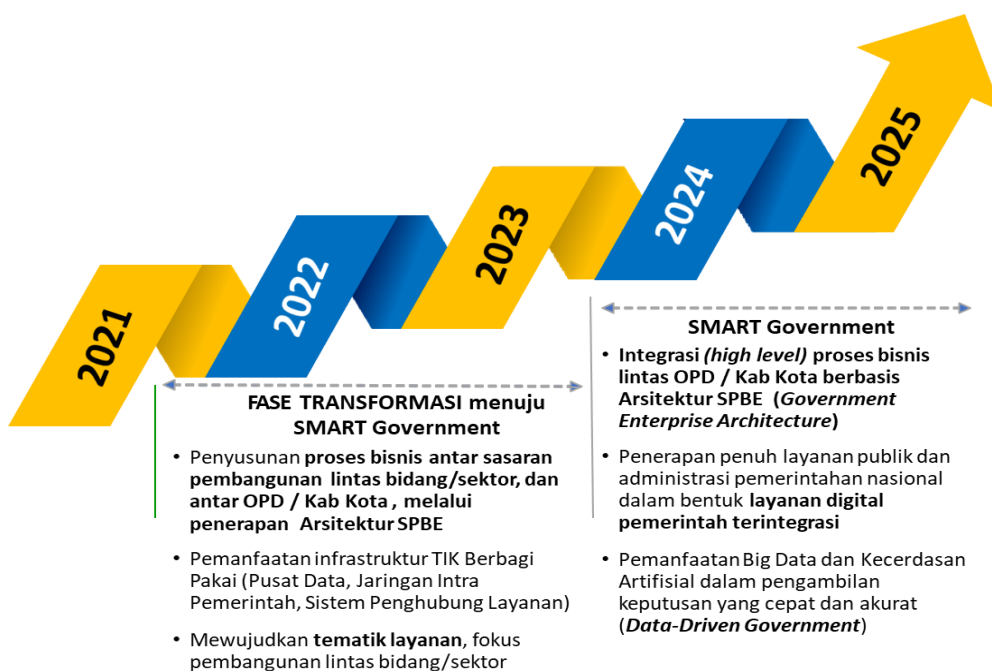
Penyelenggaraan pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*citizen-driven approach*).

5) Pelayanan Publik ( **Digital Service** )

Menyediakan layanan publik elektronik yang terpadu, secara proses bisnis dan data. Adapun manfaat yang akan didapat adalah :

- Efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. ( mudah, murah, cepat, tuntas )
- Meningkatnya produktivitas pekerja dan pengguna layanan.
- Pelayanan publik digital juga dapat menjadi media promosi pemerintah terutama untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah.
- Membangun trust society kepada pemerintah.

## 2.2.2 Tujuan Jangka menengah



Gambar 2. Fase Arah Strategis SPBE

Terdapat 2 fase yang menjadi arah strategis Provinsi Sumatera Barat , yaitu :

1. Fase Transformasi menuju *Smart Government*

Dengan target target yang harus dicapai adalah :

- Tersusunnya proses bisnis terintegrasi lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota
- Termanfaatkannya TIK berbagi pakai
  - Pusat Data, hanya terdapat beberapa Pusat Data dengan standar internasional yang dapat digunakan bersama antar OPD atau dengan kabupaten kota sebagai DRC ( *Disaster Recovery Center* )
  - Jaringan Intra Pemerintahan, interkoneksi antar OPD di Provinsi Sumatera Barat atau dengan kabupaten/kota yang tertutup dan internet dengan koneksi terpusat dan didistribusikan
  - Sistem Penghubung Layanan, memudahkan berbagi pakai data antar instansi dengan mekanisme *Government Service Bus* ( GSB )
- Terwujudnya Layanan Terpadu lintas sektor yang tematik

2. Fase terbentuknya *Smart Government*

Dengan target target yang akan dicapai adalah :

- Telah terwujud integrasi proses bisnis antar OPD , yang diturunkan dari visi misi Kepala Daerah
- Tersedianya Layanan Digital terintegrasi
- Tersedianya *Data Driven Government*, pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis pada data ( *big data* dan kecerdasan buatan )

### 2.3. Sasaran Strategis SPBE Provinsi Sumatera Barat

Untuk mewujudkan target target tersebut, maka Provinsi Sumatera Barat menentukan sasaran strategis yang dibagi menjadi 4 pilar, yaitu :



**Gambar 3. Empat Pilar Pembangunan SPBE**

### 2.3.1. Tata kelola SPBE

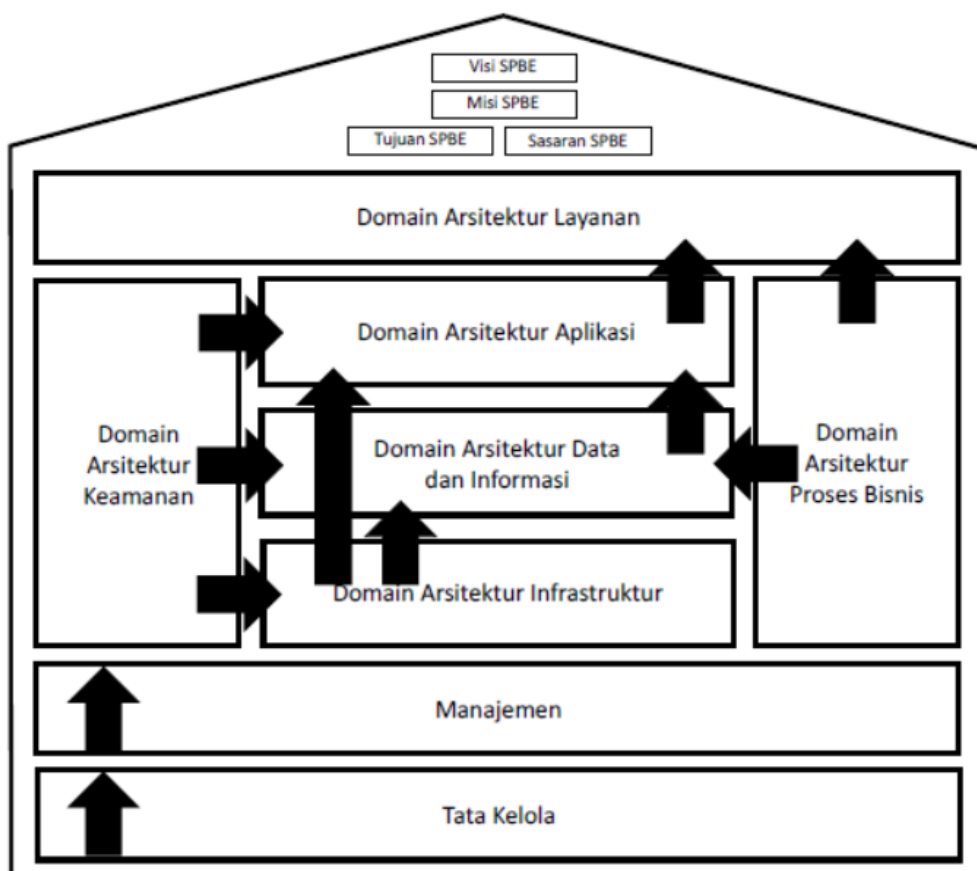
Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

#### 1. Pembuatan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Terdiri dari :

- Arsitektur Proses Bisnis
- Arsitektur Layanan
- Arsitektur Data
- Arsitektur Aplikasi
- Arsitektur Infrastruktur
- Arsitektur Keamanan

Jika digambarkan secara visual keterkaitan antara keenam arsitektur tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Keterkaitan Enam Arsitektur SPBE

## 2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

SPBE merupakan rangkaian kerja koordinatif lintas OPD, sehingga harus dibentuk Tim Koordinasi SPBE Provinsi Sumatera Barat.



*Gambar 5. Struktur Organisasi Tim Koordinasi SPBE*

## 3. Penguatan kebijakan SPBE

Pembuatan Peraturan Daerah ( perda ) atau Peraturan Gubernur ( pergub ) tentang SPBE akan menguatkan secara regulasi dan legitimasi program. Kepastian anggaran dan payung hukumnya akan berdampak pada program yang berkelanjutan. Kebijakan SPBE harus memuat hal sebagai berikut :

- a. Kebijakan Arsitektur SPBE
- b. Kebijakan Peta Rencana SPBE
- c. Kebijakan Manajemen Data
- d. Kebijakan Aplikasi SPBE
- e. Kebijakan Layanan Pusat Data
- f. Kebijakan Jaringan Intra
- g. Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
- h. Kebijakan Manajemen Keamanan
- i. Kebijakan Audit TIK
- j. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE

## 4. Manajemen SPBE

Serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen berarti ketersediaan panduan atau pedoman pelaksanaan dan entitas yang melaksnakannya. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap manajemen SPBE. Dan langkah pertama yang harus ada adalah tersediaanya panduan atau pedoman sebagai berikut :



- a. Manajemen Risiko
- b. Manajemen Data
- c. Manajemen Keamanan Informasi
- d. Manajemen Aset TIK
- e. Manajemen SDM
- f. Manajemen Pengetahuan
- g. Manajemen Perubahan
- h. Manajemen Layanan

### 2.3.2. Layanan SPBE

Keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan ini adalah suatu rangkaian proses bisnis yang terintegrasi dan memiliki *single entry*. Untuk memudahkan mengaksesnya dapat diletakkan dalam sebuah Portal Layanan Terpadu. Terdapat 2 pengelompokan layanan :

#### 1. Layanan Administrasi Pemerintahan

- a. Layanan Perencanaan
- b. Layanan Penganggaran
- c. Layanan Keuangan
- d. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- e. Layanan Kepegawaian
- f. Layanan Pengarsipan
- g. Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- h. Layanan Pengawasan Pemerintah
- i. Layanan Akuntabilitas kinerja organisasi
- j. Layanan Kinerja Pegawai

#### 2. Layanan Publik / Tematik

- a. Layanan Pengaduan
- b. Layanan Open Data
- c. Layanan JDIH
- d. Layanan Kesehatan
- e. Layanan UMKM
- f. Layanan Pendidikan
- g. Layanan Pariwisata
- h. Layanan Perijinan

#### 3. Penyelenggaraan Manajemen layanan

Pengelolaan layanan SPBE berorientasi kepada memastikan kepuasan pengguna layanan, jika terjadi permasalahan dapat memberikan respon yang cepat dan tuntas. Komponen yang harus dibangun dalam penyelenggaraan manajemen layanan ini adalah :

- a. Ketersediaan daftar layanan SPBE
- b. Terdapatnya SLA ( Service Level Agreement ) untuk setiap layanan
- c. Terdapatkan Service Desk / call center untuk menangani insiden atau permasalahan pada layanan.

### 2.3.3. TIK

TIK merupakan salah satu komponen pendukung atau enabler dari SPBE. Hal yang harus disiapkan oleh Provinsi Sumatera Barat adalah :

#### 1. Pusat Data

Ketersediaan pusat data yang memiliki standar internasional , sesuai panduan dari SNI 8799:2019 , dengan sertifikasi dari TIA 942 Rated 3.

#### 2. Jaringan Intra Pemerintah

Ketersediaan interkoneksi tertutup dalam lingkup pemerintahan.

- Antar OPD menggunakan Fiber Optic
- Antar Kabupaten Kota menggunakan Jaringan Metro

#### 3. Sistem Penghubung Layanan

Ketersediaan *Government Service Bus* Provinsi Sumatera Barat, yang digunakan untuk berbagi pakai data antar OPD atau antar Kabupaten Kota ke dan dari Provinsi.

#### 4. Portal Data

Ketersediaan Portal Data Provinsi Sumatera Barat, untuk mendistribusikan data agar dapat diintervensi oleh publik. Adapun syarat dari data yang dipublish adalah:

- Sesuai standar data
- Memiliki metadata
- Berbasis pada kode referensi dan data induk
- Memiliki interoperabilitas

Portal Data ini adalah output dari peraturan tentang Satu Data Indonesia.

#### 5. Pengembangan Aplikasi

Pembuatan aplikasi khusus, yang bukan aplikasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Tentu saja aplikasi khusus ini sesuai dengan prioritas yang dipilih dan yang telah memiliki rangkaian proses bisnis. Syarat dari pengembangan aplikasi ini adalah :

- Dokumentasi sesuai SDLC ( *System Development Life Cycle* )
- Dokumentasi sesuai STLC ( *System Testing Life Cycle* )

**6. Pengembangan Bigdata dan Kecerdasan Buatan**

Untuk memberikan analisa yang bersifat *Diagnostic*, *Predictive* dan *Prescriptive*. Berguna untuk mengambil keputusan dan kebijakan. Langkah yang bisa diambil adalah :

- Pembuatan Arsitektur Big Data
- Pembuatan Infrastruktur Big Data sesuai arsitektur
- Pengelolaan Big Data
- Penyiapan SDM dengan kompetensi Big Data dan Kecerdasan Buatan

**7. Pengembangan Keamanan Informasi**

Keamanan Informasi berbasis risiko, dimana setiap kendali atau kontrol yang digunakan adalah sebagai treatment dari risiko yang muncul. Acuan pengelolaan keamanan berdasarkan pada SNI 27001.

**8. Audit TIK**

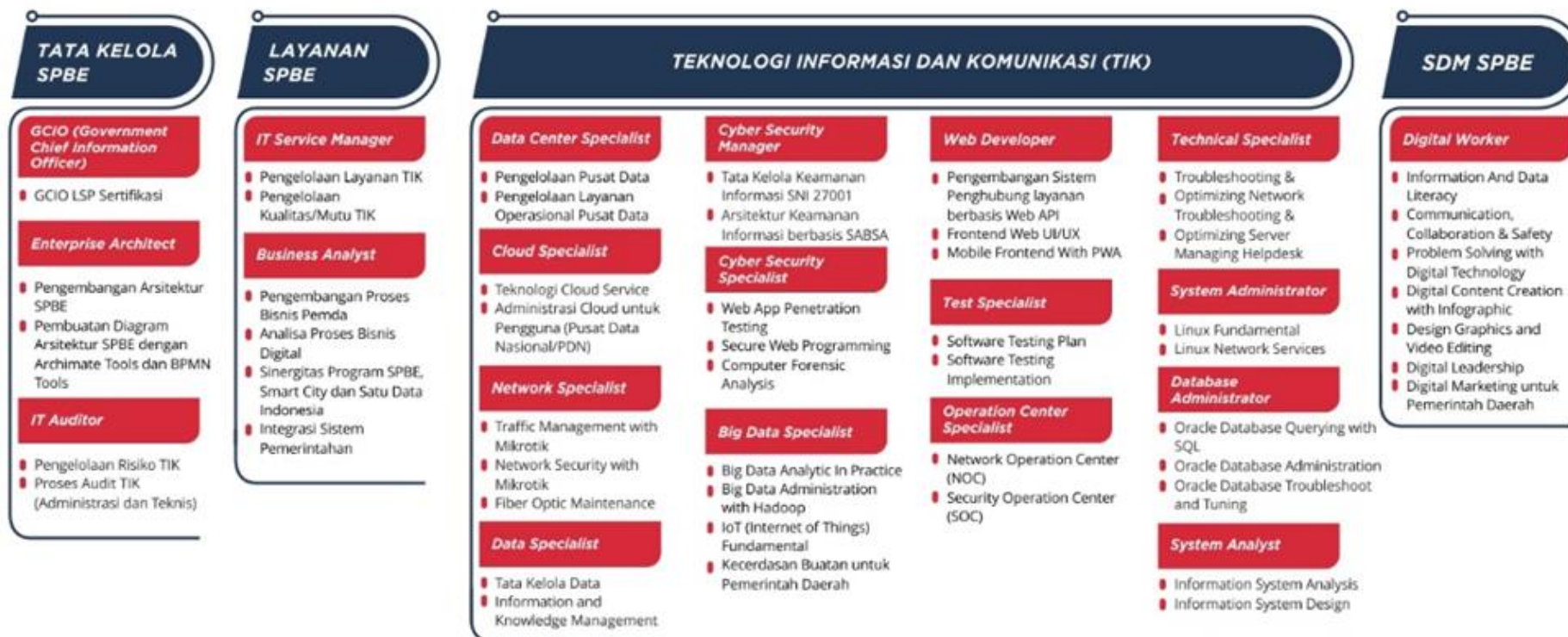
Melakukan Audit TIK secara reguler baik secara internal ataupun eksternal yang meliputi :

- Audit Aplikasi
- Audit Infrastruktur
- Audit Keamanan Informasi

**2.3.4. SDM SPBE**

SDM merupakan kunci dari perubahan, karena transformasi digital adalah tentang perubahan. Modal dari pemerintah daerah adalah regulasi, anggaran dan ASN. Ketiga hal inilah yang menggerakkan roda pemerintahan. Dalam kaitannya dengan SDM SPBE, terdapat beberapa langkah yang dilakukan :

## 1. Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE



Gambar 6. Standar Kompetensi SDM Teknis SPBE

## 2. Melakukan asesmen SDM SPBE

Untuk menilai kemampuan dari SDM yang ada berdasarkan kompetensi atau kumpulan kompetensi dalam sebuah *Job Role*. Asesmen akan menghasilkan report untuk memastikan level kompetensi yang dicapai , serta saran pelatihan yang disarankan.

## 3. Melakukan Pelatihan

Pelatihan yang terintegrasi yang memastikan daya serap / kognitif dapat tercapai

## 4. Melakukan Sertifikasi

Sertifikasi adalah pembuktian terhadap suatu kompetensi

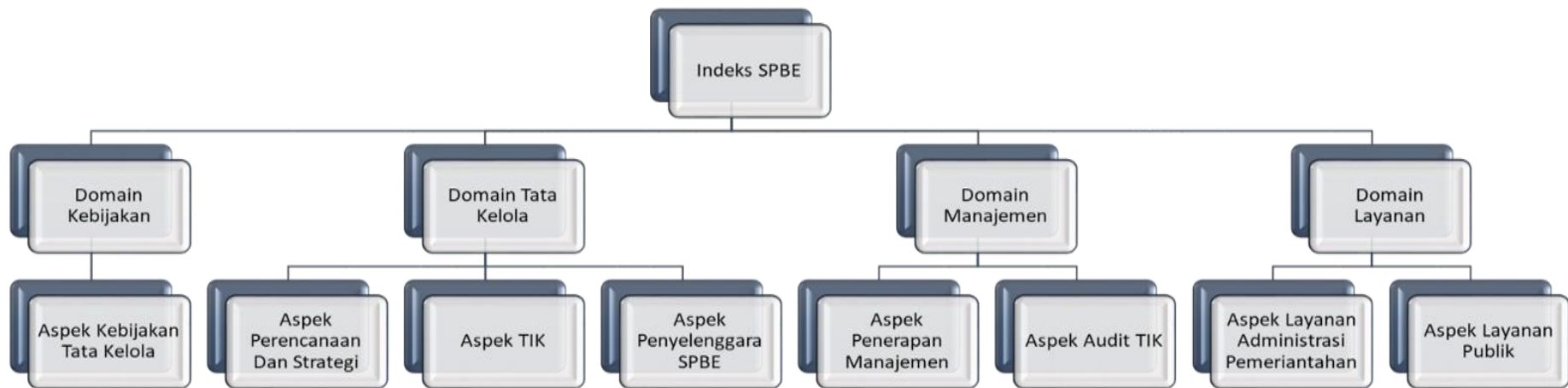


*Gambar 7. Sertifikasi Kompetensi SDM*

## 5. Literasi Digital

Pengembangan literasi digital berupa Etis Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Cakap Bermedia Digital dan Budaya Bermedia Digital.

## 2.4. Evaluasi dan Penilaian SPBE

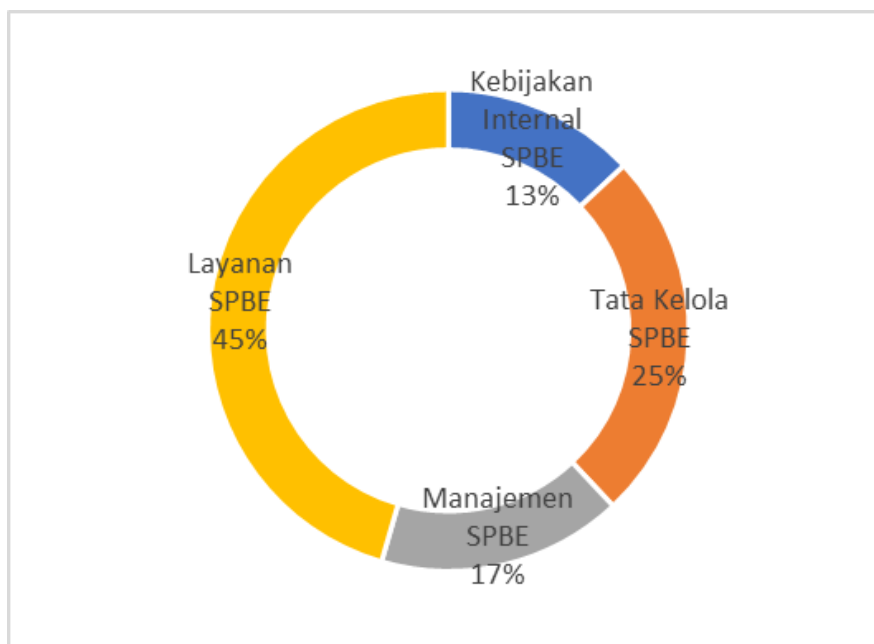


*Gambar 8. Evaluasi Indeks SPBE*

Penilaian SPBE memiliki 4 Domain, 8 Aspek dan 47 Indikator , yang dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Bobot nilai untuk setiap domain adalah



**Gambar 9. Bobot Nilai Indeks SPBE**

Di dalam setiap indikator terdapat kegiatan / aktifitas yang disertai dengan data dukung sebagai bukti terlaksananya kegiatan tersebut.

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

**Tabel 1. Kategori Nilai Indeks SPBE**

NO	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 3 berikut.

**Tabel 2. Karakteristik Level Indeks SPBE**

<b>Tingkat (Level)</b>	<b>Karakteristik</b>
<b>1 – Rintisan</b>	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
<b>2 – Terkelola</b>	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
<b>3 – Terstandarisasi</b>	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
<b>4 – Terintegrasi dan Terukur</b>	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
<b>5 – Optimum</b>	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan



Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 3 berikut.

*Tabel 3. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE*

Tingkat (Level)	Kriteria
<b>1 – Informasi</b>	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
<b>2 – Interaksi</b>	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
<b>3 – Transaksi</b>	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
<b>4 – Kolaborasi</b>	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
<b>5 – Optimalisasi</b>	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

Berikut adalah pemetaan terhadap indikator dan data dukung, ditunjukkan oleh gambar 10.

			DATA DUKUNG
Kebijakan Internal	Kebijakan Tata Kelola SPBE	Indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen, dan Audit TIK SPBE	Terdapatnya Pergub / Perda yang mengambil referensi dari Perpres 95 tahun 2018, dengan ruang lingkup
Tata Kelola	Perencanaan Strategis SPBE	Indikator terkait arsitektur, peta rencana, anggaran, dan proses bisnis SPBE	Terdapatnya Peta Rencana dan Arsitektur SPBE
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indikator kematangan pembangunan jaringan intra pemerintah, pusat data, dan sistem penghubung layanan SPBE	Dokumen Aktifitas pengembangan aplikasi SPBE, Dokumen Daftar layanan pusat data, Dokumen SOP Operasional Pusat Data, Dokumen SOP Perawatan Pusat Data, Daftar Layanan Jaringan Intranet, Dokumen SOP Operasional Jaringan, Dokumen SOP Perawatan Jaringan, Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan
	Penyelenggara SPBE	Indikator pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE	Dokumentasi pelaksanaan program Tim Koordinasi SPBE, Dokumentasi aktifitas kegiatan kolaborasi penerapan SPBE
Manajemen	Penerapan Manajemen SPBE	Indikator manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, dan Layanan SPBE	Pedoman /Panduan : Risiko, SMK, Data, Pengetahuan, Aset TIK, Kompetensi SDM, Perubahan, Layanan
	Audit TIK	Indikator audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE	Laporan Audit Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan Informasi
Layanan	Layanan Administrasi Pemerintahan	Indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, kinerja	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya
	Layanan Publik	Indikator layanan pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lain	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya

Gambar 10. Indikator dan Data Dukung Evaluasi Indeks SPBE

## BAB III

### KONDISI AKTUAL PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2019

Kementerian PANRB pada tahun 2019 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat yang meliputi 3 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar **3,1**. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagai berikut :

*Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019*

Domain	Aspek	Indeks
<b>Kebijakan</b>		<b>3,00</b>
	Kebijakan Tata Kelola	3,71
	Kebijakan Layanan	2,50
<b>Tata Kelola</b>		<b>3,00</b>
	Kelembagaan	3,50
	Strategi dan Perencanaan	3,00
	TIK	2,67
<b>Layanan</b>		<b>3,18</b>
	Layanan Administrasi Pemerintah	3,29
	Layanan Publik	3,00
<b>INDEKS SPBE</b>		<b>3,1</b>

Dengan nilai indeks 3,1; maka Provinsi Sumatera Barat masuk kategori **Baik**. Yang jika diurai dalam karakteristik , sebagai berikut :

- Tata Kelola : (3) Terstandarisasi  
Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
- Layanan : (3) Transaksi  
Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan

#### 3.2. Kondisi Aktual Penerapan SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam program strategis seperti yang ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 4. Kondisi Aktual Penerapan SPBE

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan 10 Kebijakan SPBE (Perbup/Perwali/SK/SE)	Perda No 20 tahun 2018	Belum memuat 10 kebijakan SPBE
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	Belum memiliki panduan	
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Sedang di lakukan	
4	Membuat Arsitektur SPBE ( 6 Arsitektur SPBE )	Belum memiliki dokumen arsitektur	
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksi nya	Sudah terbentuk dan ada SK nya	Belum pernah melakukan rapat koordinasi
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE ( update indeks SPBE )	Mengikuti agenda Kemenpan	
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data /Server Room /DRC	Peningkatan infrastruktur ruangan	
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro / VPN / Backbone FO	Dilakukan dengan Metro	
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	Belum membuat GSB	
10	Integrasi Layanan Elektronik( Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	- Menggunakan SIPD - Menggunakan lapor SPAN dan Srikandi -Simpeg menggunakan aplikasi sendiri	Sebelumnya memiliki E-Planning dan E-budgetting sendiri
11	Membangun Portal Data	Belum memiliki portal data	
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi ( Indeks KAMI ) / SNI 27001	Belum memiliki panduan keamanan informasi	
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum memiliki kecerdasan buatan	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Belum ada	

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE ( Antar OPD /Antar Kabupaten )	Belum ada	
16	Membentuk SDM TIK	Sudah di lakukan pelatihan dan sertifikasi	
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Sudah ada “Sumbar Madani” aplikasi mobile di playstore	
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Belum ada	
19	Melakukan survey pengguna berkala ( tingkat kepuasan dan koreksi )	Belum ada	
20	Membuat Call Center Layanan	Belum ada	

### 3.2.1. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

*Tabel 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah*

NO	NAMA OPD	SUMBER
1	Sekretariat Daerah	Pergub Sumbar No. 74 Tahun 2020
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
3	Biro Hukum	
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	
5	Biro Perekonomian	
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
7	Biro Administrasi Pembangunan	
8	Biro Organisasi	
9	Biro Umum	
10	Biro Administrasi Pimpinan	
11	Inspektorat	Pergub Sumbar No. 9 Tahun 2020
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pergub Sumbar No. 11 Tahun 2020
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
14	Badan Pendapatan Daerah	
15	Badan Kepegawaian Daerah	

NO	NAMA OPD	SUMBER
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pergub Sumbar No.3 Tahun 2020
17	Badan Penelitian dan Pengembangan	
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
20	Badan Penghubung	
21	Dinas Pendidikan	
22	Dinas Kesehatan	
23	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	
24	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	
27	Dinas Sosial	
28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
30	Dinas Pangan	
31	Dinas Lingkungan Hidup	
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
34	Dinas Perhubungan	
35	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
38	Dinas Pemuda dan Olahraga	
39	Dinas Kebudayaan	
40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	
42	Dinas Pariwisata	
43	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
44	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
45	Dinas Kehutanan	
46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
48	RSJ HB. Saanin	
49	RSUD M. Natsir Solok	
50	RSUD Pariaman	
51	RS Achmad Muchtar Bukittinggi	

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Provinsi Sumatera Barat digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
2. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
5. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
    - 1) Seksi Penyediaan Informasi Publik;
    - 2) Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
    - 3) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
  - b. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
    - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

2) Seksi Pengembangan Aplikasi; dan

3) Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.

c. Bidang Statistik Sektoral, membawahkan:

1) Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

2) Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan

3) Seksi Statistik Sektor Pemerintah, Politik, Hukum dan Keamanan.

d. Bidang Siber dan Sandi, membawahkan:

1) Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;

2) Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi;

3) Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3.2.2. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti ditunjukkan tabel 5.

*Tabel 6. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK*

NO	Nomor dan Perihal	Jenis
1	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan SPBE	Peraturan Daerah
2	Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Perkantoran Berbasis Elektronik	Peraturan Gubernur
3	Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Aplikasi	Peraturan Gubernur
4	Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Induk SPBE	Peraturan Gubernur

### 3.2.3. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan dalam 3 perspektif , yaitu:

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);



2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

Tabel 7. Tata Kelola TIK di Provinsi Sumatera Barat

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Perencanaan ( Adanya Masterplan TIK )	Ada – Master Plan TIK	Tahun 2019 – 2024, tidak menjadi rujukan
2	Pengembangan		
	a) Pengembangan Infrastruktur Data Center	1 Room server : - ukuran 5x5m - menggunakan raised floor - sudah memiliki system cooling - 18 server fisik, 12 server host virtual (belum ada backup, hanya ada 1 server). - DRC ada di icon+ cloud dan co location.	Meletakkan server OPD dan server kabupaten/kota. Teknologi virtualisasi yang di pakai VMware dan Proxmox.
	b) Pengembangan Jaringan OPD	Metro 70 titik + 33 titik sekolah, Bw 3Gb. VPN untuk disdukcapil.	Sudah mencakup seluruh OPD di wilayah kota Padang. Internet management dan fire wall untuk mengelola Bw 3Gb. Merencanakan Vsat.
	c) Pengembangan Aplikasi khusus		
	d) Proses Penganggaran tahunan	Ada – Dana dan Realisasi Per Tahun	2017 -2021
	e) Pengembangan SDM TIK	Organik = 19 orang Non organic = 35 orang	Sudah melakukan pelatihan SDM : 1. Data 2. Infrastruktur 3. Pengembangan aplikasi 4. Keamanan informasi
3	Operasional		

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
	a) Berfungsinya Operator OPD / PIC	Ada di setiap opd untuk PIC jaringan.	Terkoordinasi dengan Diskominfo
	b) Adanya Pusat Service Desk ( <i>Single point of contact</i> )	Belum memiliki call center layanan IT.	
	c) Adanya Daftar Layanan TIK	1. Layanan penyediaaan internet 2. Layanan colocation 3. Layanan Pembuatan aplikasi 4. Layanan video converence 5. Layanan service desk	
	d) Adanya SLA Layanan TIK	Belum punya SLA	
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Belum pernah melakukan audit	
5	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfo	Sudah di lakukan	
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE ( apakah sudah ada atau belum )	Belum pernah rapat bersama tim koordinasi SPBE	

### 3.2.4. Infrastruktur Jaringan

Dari sisi infrastruktur jaringan, sudah terdapat jaringan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jaringan internet yang terpusat di Dinas Kominfo, yang alokasi bandwidth masing-masing OPD ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 8. Daftar Alokasi Bandwidth Internet di masing-masing OPD

NO	OPD	USER	Kapasitas BW (Mbps)
1	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumbar (PSDA)	158	50
2	Dinas Pariwisata Prov. Sumbar	66	50
3	Sekretariat DPRD Prov. Sumbar	350	65
4	Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumbar	40	30
5	Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	281	100
6	Rumah Sakit Jiwa H.B Saanin	335	30
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumbar (BPSDM)	116	50
8	Dinas Pangan Prov. Sumbar	120	30
9	Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	110	50
10	Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	70	30
11	Kantor Samsat Kota Padang	0	100
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumbar (DKP)	150	30
13	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (Dinkes)	285	50
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Sumbar (PUPR)	350	30
15	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar (Perkimtan)	75	30
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumbar	56	30
17	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumbar (Dispora)	78	30
18	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar (BKD)	83	100
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67	30
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumbar (BPMPSTP)	60	30
21	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar (Diskominfo)	100	500

NO	OPD	USER	Kapasitas BW (Mbps)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar (DPMD)	67	30
23	Dinas Arsip dan Perpustakaan Prov. Sumbar. (Bid. Arsip)	44	30
24	PLUT- Dinas Koperasi dan UKM Prov Sumbar	20	20
25	Dinas Arsip dan Perpustakaan Prov. Sumbar (Gedung Perpustakaan Daerah)	111	50
26	Inspektorat Prov. Sumbar	85	40
27	Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar	30	30
28	Mesjid Raya Sumbar	0	20
29	Gedung LKAAM/ Dinas Kebudayaan (Bid. Budaya)	15	20
30	Komisi Penyiaran Informasi Daerah Prov. Sumbar (KPID)	21	20
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumbar (ESDM)	67	70
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar (Nakertrans)	120	50
33	Komisi Informasi Sumbar	13	20
34	Palang Merah Indonesia	10	20
35	Kantor Gubernur Sumbar (Gedung Rumah Bagonjong)	165	100
36	Ruang Gubernur	5	100
	Ruang Wakil Gubernur	5	
	Biro Kerjasama Rantau	29	
	Balitbang	31	
	Ruang Sekda	5	
	Ruang Asisten II	10	
	Biro Umum	80	
	Kantor Gubernur (Gedung Escape Building)	303	
	Biro Humas	32	
	Biro Aset	66	
	Biro Pemerintahan	36	

NO	OPD	USER	Kapasitas BW (Mbps)
	Biro Perekonomian	35	
	Biro Organisasi	38	
	Biro Bina Mental dan Kesra	66	
	Biro Hukum	30	
37	Rumah Dinas Wakil Gubernur	10	20
38	Rumah Sekda Prov. Sumbar	10	20
39	Istana dan Auditorium Gubernur	100	20
40	Rumah Dinas Gubernur	20	20
41	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	120	50
42	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	50	50
43	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar (Bid. Perkebunan)	90	30
44	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Prov. Sumbar (Bid. Pengawasan)	52	20
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sumbar (Kesbangpol)	50	30
46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar (Disperindag)	135	30
47	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar (Satpol PP dan Damkar)	150	50
48	Badan Keuangan Daerah Prov Sumbar (Bakeuda)	100	100
49	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar (DLH)	80	50
50	Dinas Sosial Prov. Sumbar	80	45
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumbar (Bappeda)	86	100
52	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar	170	50
53	Pusdalog BPBD Prov. Sumbar	5	20
54	Mesium Adityawarman		20

NO	OPD	USER	Kapasitas BW (Mbps)
55	Sekolah SMA/SMK Se-Kota Padang (31 Sekolah)		310
			3100

### 3.3. Visi, Misi dan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode tahun 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**

Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat adalah:

- Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
- Misi 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Bsandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
- Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
- Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
- Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
- Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Khususnya dapat diulas pada Misi Ketujuh, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas, sangat relevan dan sesuai dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Misi ketujuh ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

## BAB IV

### TARGET PENGEMBANGAN SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 4.1. Target SPBE Provinsi Sumatera Barat

Target SPBE Provinsi Sumatera Barat terbentuknya Smart Government di tahun 2023, dimana indikator untuk hal tersebut adalah :

1. Telah terbentuknya integrasi proses bisnis antar OPD
2. Telah tersedianya layanan digital pemerintah terintegrasi
3. Telah tersedianya analisa data hingga tataran diagnosa, prediktif dan preskriptif untuk mengambil keputusan dan kebijakan

Untuk mencapai target tersebut, tentu terdapat serangkaian proses yang harus dilakukan sebagai bentuk *quality assurance*, yaitu indeks SPBE. Indeks SPBE bernilai 5 atau memuaskan adalah target yang ditetapkan untuk dapat dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 9. Target Kematangan Kebijakan Internal SPBE Provinsi Sumatera Barat**

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal SPBE	Target
Arsitektur SPBE	5
Peta Rencana SPBE	5
Manajemen Data	5
Pembangunan Aplikasi SPBE	5
Layanan Pusat Data	5
Pengoperasian Jaringan Intra	5
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
Manajemen Keamanan Informasi	5
Audit TIK	5
Tim Koordinasi SPBE	5
Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE	Baseline
Perencanaan Strategis SPBE	5
Arsitektur SPBE	3
Peta Rencana SPBE	5
Rencana dan Anggaran SPBE	5



Tingkat Kematangan Kebijakan Internal SPBE	Target
Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	5
Pembangunan Aplikasi SPBE	5
Layanan Pusat Data	5
Layanan Jaringan Intra	5
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
Penyelenggara SPBE	5
Tim Koordinasi SPBE	5
Kolaborasi Penerapan SPBE	5

*Tabel 10. Target Kematangan Manajemen SPBE Provinsi Sumatera Barat*

Tingkat Kematangan Manajemen SPBE	Baseline
Penerapan Manajemen SPBE	5
Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5
Penerapan Manajemen Data	5
Penerapan Manajemen Aset TIK	5
Penerapan Manajemen SDM	5
Penerapan Manajemen Pengetahuan	5
Penerapan Manajemen Perubahan	5
Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5
Audit TIK	5
Audit Infrastruktur SPBE	5
Audit Aplikasi SPBE	5
Audit Keamanan SPBE	5

Tabel 11. Target Tingkat Kematangan Layanan SPBE

Tingkat Kematangan Layanan SPBE	Baseline
Layanan Administrasi Pemerintahan	5
Layanan Perencanaan	5
Layanan Penganggaran	5
Layanan Keuangan	5
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
Layanan Kepegawaian	5
Layanan Pengarsipan	5
Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	5
Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	5
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
Layanan Kinerja Pegawai	5
Layanan Publik	5
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
Layanan Data Terbuka	5
Layanan JDIH	5
Layanan Publik Sektoral-1	5
Layanan Publik Sektoral-2	5
Layanan Publik Sektoral-3	5

## 4.2. Target Sasaran Strategis Per Domain SPBE

Pengembangan SPBE Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat di gambar 1, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE;
- Layanan SPBE;
- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Sumber Daya Manusia SPBE

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Koordinasi SPBE</li> <li>Arsitektur SPBE</li> <li>Kebijakan SPBE</li> <li>Evaluasi SPBE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Survey Pengguna SPBE</li> <li>Portal Pelayanan Publik</li> <li>Portal Administrasi Pemerintahan</li> <li>Managemen Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Data</li> <li>Jaringan Intra</li> <li>Sistem Penghubung</li> <li>Layanan Berbagi Pakai</li> <li>Portal Data</li> <li>Sistem Keamanan Informasi</li> <li>Teknologi Kecerdasan Buatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promosi Literasi</li> <li>Kapasitas ASN</li> <li>Forum Kolaborasi SPBE</li> </ul>

**Gambar 11. Empat Kategori Pengembangan SPBE Provinsi Sumatera Barat**

### 1. Tata Kelola SPBE

**Tabel 12. Target Tata Kelola SPBE**

No	Target	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terbentuknya Arsitektur SPBE Sumatera Barat		X			
2	Terbentuknya Perda / Pergub SPBE		X			
3	Terbentuknya Tupoksi dan legalitas Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat	X				
4	Terlaksananya Audit TIK		X	X	X	X

### 2. Layanan SPBE

**Tabel 13. Target Layanan SPBE**

No	Target	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terbentuknya Portal Layanan Publik Terintegrasi			X		
2	Terbentuknya Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi		X			

No	Target	2021	2022	2023	2024	2025
3	Terbentuknya Portal Layanan / Service Desk / Call Center SPBE		X			
4	Terlaksanakannya Survey Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna SPBE	X	X	X	X	X

### 3. Kesiapan TIK

Tabel 14. Target Kesiapan TIK

No	Target	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terbentuknya Pusat Data tersertifikasi Internasional			X		
2	Terhubungnya antar OPD di Sumatera Barat dengan interkoneksi tertutup dengan FO		X			
3	Terhubungnya antar Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dengan interkoneksi tertutup dengan jaringan Metro		X			
4	Tersedianya Government Service Bus ( GSB) Sumatera Barat untuk berbagi data antar OPD atau antar Kabupaten Kota		X			
5	Tercapainya <i>Confidentiality, Integrity</i> dan <i>Availability</i> dengan level SLA yang disepakati pada aspek Keamanan Informasi		X			
6	Terbentuknya Big Data dan Kecerdasan Buatan Provinsi Sumatera Barat		X			
7	Terbentuknya Portal Data Sumatera Barat		X			

## 4. Kesiapan SDM SPBE

Tabel 15. Target Kesiapan SDM SPBE

No	Target	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terbentuknya Standar Kompetensi SDM SPBE	X				
2	Terlaksananya asesmen SDM Teknis SPBE dari Dinas Kominfo	X				
3	Terlaksananya Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Tata Kelola</b> , dengan Job Role Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO		X			
4	Terlaksananya Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Infrastruktur</b> , dengan Job Role Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist		X			
5	Terlaksananya Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Keamanan Informasi</b> , dengan Job Role Cyber Security Manager, Cyber Security Specialist, Operation Center Specialist		X			
6	Terlaksananya Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Pengembangan Aplikasi</b> , dengan Job Role Web Developer, System Analyst, Database Administrator			X		
7	Terlaksananya Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Big Data</b> , dengan Job Role Big Data Specialist, Data Specialist	X				
8	Terlaksananya Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Literasi Digital</b> , dengan Job Role Digital Skill ( Digital Worker ) untuk seluruh ASN	X	X	X	X	X

## BAB V

### ANALISA KESENJANGAN

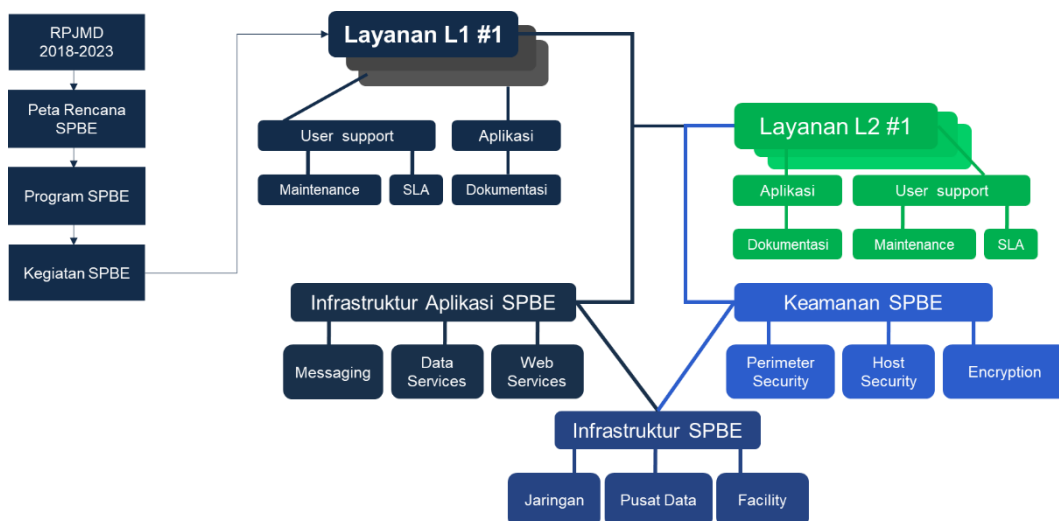
#### 5.1. Analisa Kesenjangan

Analisa ini untuk mendapatkan program kegiatan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari Provinsi Sumatera Barat, adapun pendekatan analisa dilakukan melalui :

1. Meta Model Peta Rencana
2. Keterpaduan Unsur SPBE
3. Keterkaitan SPBE dan SDI ( Satu Data Indoensia )
4. Komponen Peta Rencana SPBE ( Aktual dan Target )

#### 5.2. Meta Model Peta Rencana

Dengan kondisi aktual dan target yang telah terdefiniskan, maka kesenjangan akan menjadi bahan untuk memenuhi target yang diinginkan. Perlu pandangan yang menyeluruh dan sistemik terlebih dahulu terhadap aspek dan komponen yang menyusun SPBE Sumatera Barat. Hal tersebut dapat digambarkan dalam meta model sebagai berikut :



**Gambar 12. Meta Model Komponen Penyusun SPBE Provinsi Sumatera Barat**

Nampak bahwa terdapat keterpaduan yang dimulai dari RPJMD yang menjadi rujukan utama dalam menyusun Peta Rencana SPBE, pada misi kedua dari Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian diturunkan menjadi sasaran pada pelayanan publik, dengan Indeks SPBE sebagai target ukuran keberhasilannya.

Maka inti dari kegiatan SPBE adalah membangun layanan publik yang berkualitas, dengan didukung kesiapan pada aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Referensi layanan publik terpadu yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

**Tabel 16. Layanan Publik Terpadu SPBE**

Kode	Layanan Publik Terpadu	Kode	Layanan Publik Terpadu
01.01	Layanan Informasi	01.14	Layanan Pemukiman
01.02	Layanan Komunikasi	01.15	Layanan Ilmu Pengetahuan & Teknologi
01.03	Layanan Kebudayaan	01.16	Layanan Perlindungan Sosial
01.04	Layanan Usaha	01.17	Layanan Perdagangan
01.05	Layanan Pendidikan	01.18	Layanan Pariwisata
01.06	Layanan Energi	01.19	Layanan Transportasi
01.07	Layanan Lingkungan Hidup	01.20	Layanan Kesejahteraan
01.08	Layanan Industri	01.21	Layanan Ekonomi
01.09	Layanan Hubungan Internasional	01.22	Layanan Hukum dan Peraturan
01.10	Layanan Kesehatan	01.23	Layanan Kenegaraan
01.11	Layanan Pertanian Perkebunan Pternakan	01.24	Layanan Perizinan dan Akreditasi
01.12	Layanan Ketenagakerjaan	01.25	Layanan Kependudukan
01.13	Layanan Agama	01.26	Layanan Pemerintahan

Dari referensi layanan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menentukan tematik layanan pemerintah, yang didasari pada 3 hal :

1. PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
2. UU no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Layanan tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut.

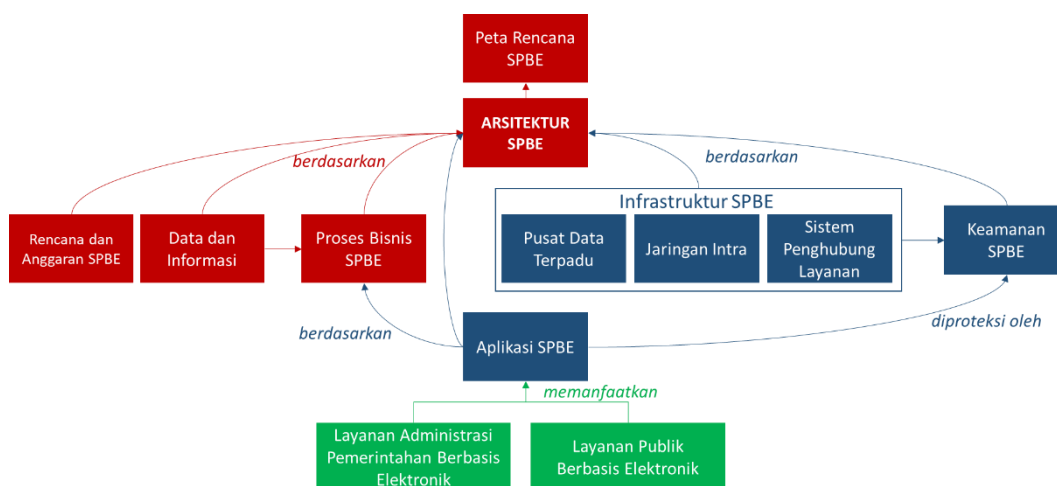
Tabel 17. Tematik Layanan SPBE Provinsi Sumatera Barat

SPM ( Government to Citizen /G2C )	Layanan Bisnis ( Government to Business /G2B )
Pendidikan	Perdagangan
Kesehatan	Perindustrian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyiaran
Perumahan Rakyat dan Permukiman	Ekonomi
Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan	Perijinan
Sosial	

Jenis layanan SPM adalah yang ditargetkan dan diprioritaskan menjadi layanan publik terpadu berbasis elektronik. Kemudian disusul pada G2B yang berdampak pada sektor peningkatan ekonomi.

### 5.3. Keterpaduan Unsur SPBE

Menganalisa bahwa SPBE adalah sebuah sistem yang saling terkait, sehingga kekurangan yang belum dipenuhi dapat dilihat prioritas dan perannya. Berikut adalah keterpaduan unsur SPBE



Gambar 13. Keterpaduan Unsur SPBE



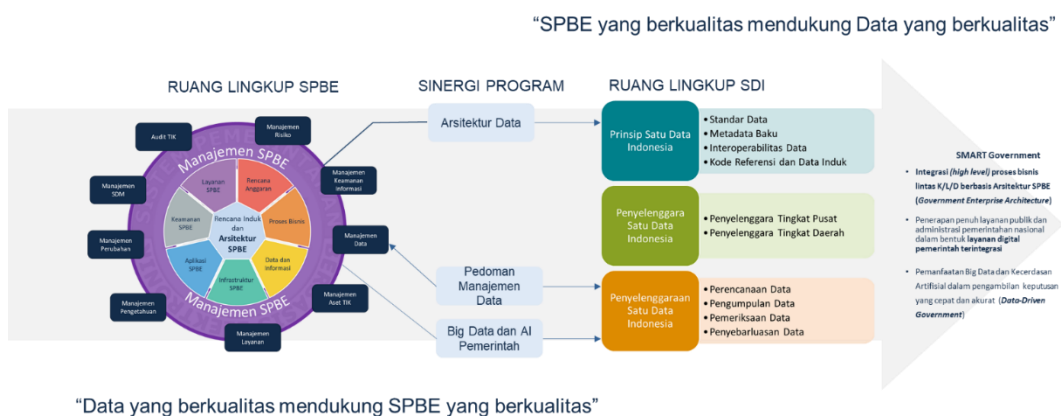
Keterpaduan tersebut dimulai dari :

1. Diawali dengan penyediaan layanan terpadu baik administrasi pemerintahan atau publik , yang semua nya berbasis elektronik.
2. Sebuah layanan, dapat berjalan secara elektronik dengan memanfaatkan aplikasi
3. Aplikasi dibuat berdasarkan proses bisnis yang telah terdefinisi
4. Aplikasi diproteksi oleh keamanan SPBE
5. Aplikasi dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
6. Infrastruktur dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
7. Infrastruktur diproteksi oleh keamanan SPBE
8. Data dan Informasi dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
9. Data dan Informasi mendukung berjalannya proses bisnis
10. Keamanan SPBE dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
11. Rencana dan Anggaran dibuat sesuai dengan Arsitektur SPBE
12. Arsitektur SPBE dibuat atas arah dan kebijakan yang tertera dalam Peta Rencana SPBE
13. Peta Rencana SPBE Daerah dibuat selaras dengan RPJMD dan Peta Rencana SPBE Nasional

Yang menjadi faktor kunci bagi provinsi Sumatera Barat adalah ketersediaan Arsitektur SPBE Sumatera Barat, yang akan menjadi sentral penerapan SPBE. Dan dengan ketersediaan anggaran SPBE.

#### 5.4 Keterkaitan SPBE dan SDI ( Satu Data Indonesia )

SPBE dan SDI merupakan kebijakan yang saling terkait dalam mewujudkan smart government. SPBE fokus pada Layanan Terpadu berbasis elektronik, sedangkan SDI fokus pada pembentukan Portal Data dengan basis standar data, metadata, kode referensi dan data induk, kualitas data yang menuju ke interoperabilitas data. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 14. Keterkaitan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI)**

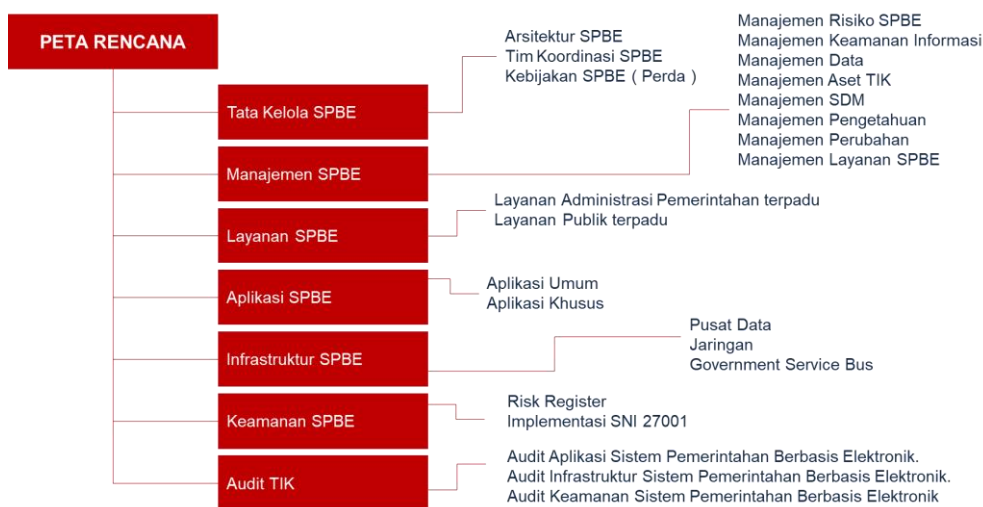
Sinergi program antara SPBE dan SDI terdapat pada 3 hal :

1. Adanya Arsitektur Data yang merupakan bagian dari Arsitektur SPBE
2. Pedoman Manajemen Data ( Manajemen Arsitektur Data, Manajemen Kode Referensi Data dan Data Induk, Manajemen basis data dan Manajemen kualitas data )
3. Big Data dan Kecerdasan Buatan Pemerintah.

Maka ketiga hal tersebut menjadi prioritas dari Provinsi Sumatera Barat untuk diwujudkan segera dan menjadi arahan strategis dalam Peta Rencana SPBE ini.

### 5.5. Komponen Peta Rencana SPBE

Komponen dari Peta Rencana SPBE menjadi panduan terhadap langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Provinsi Sumatera Barat.



**Gambar 15. Langkah Penyiapan dan Pelaksanaan SPBE di Provinsi Sumatera Barat**

Dengan menganalisa dari kondisi aktual dan target , dalam perspektif komponen SPBE, maka yang perlu disiapkan oleh Sumatera Barat adalah :

**Tabel 18. Daftar Langkah Strategis Pelaksanaan SPBE dalam Perspektif Komponen SPBE**

No	Komponen /Dimensi	Yang harus dilakukan
1	Tata Kelola SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Arsitektur SPBE</li> <li>• Membuat Perda / Pergub SPBE</li> </ul>
2	Manajemen SPBE	Membuat seluruh Pedoman/ Panduan yang diamanatkan
3	Layanan SPBE	Membuat Portal Layanan ( Integrasi Proses Bisnis )
4	Aplikasi SPBE	Membuat aplikasi untuk Layanan Publik dalam SPM
5	Infrastruktur SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Pusat Data Rated 3</li> <li>• Membuat GSB ( <i>Government Service Bus</i> )</li> </ul>
6	Keamanan SPBE	Penerapan Pedoman SMKI
7	Audit TIK	Melakukan Audit aplikasi, Infrastruktur dan keamanan secara internal atau eksternal

## BAB VI

### PERCEPATAN SPBE SUMATERA BARAT

Persiapan dan pelaksanaan SPBE memerlukan prioritas yang dapat dilakukan lebih cepat. Tentu saja terdapat target indeks SPBE dan juga penerapan yang berbentuk layanan berbasis elektronik. Adapun percepatan dan prioritas tersebut adalah :

1. **Pembuatan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat (Tata Kelola SPBE)**  
Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat , akan menggambarkan keintegrasian proses bisnis, layanan, aplikasi dan data, serta infrastruktur dan keamanan informasi yang mendukungnya. Visi, Misi, Sasaran dan Program yang terdapat dalam RPJMD akan menjadi langkah awal untuk membuat Proses Bisnis yang kemudian akan diintegrasikan ke sistem informasi.
2. **Penguatan Kapasitas Tim SPBE (Tata Kelola SPBE)**  
Tim Koordinasi SPBE dapat terdiri dari Dinas Kominfo, Bappeda, Biro Organisasi, Badan Keuangan Daerah, OPD yang terkait dengan Tematik Layanan Terpadu Prioritas. Penguatan dilakukan dengan mengadakan pertemuan regular untuk membahas perkembangan penerapan peta rencana SPBE yang telah dimiliki.
3. **Pembuatan Layanan Terpadu Digital Kepegawaian (Layanan SPBE)**  
Menyelaraskan dengan pemerintah pusat, dikembangkan dengan fungsi fungsi khusus pada proses bisnis kepegawaian dengan aplikasi.
4. **Pembuatan Layanan Terpadu Digital Pertanian (Layanan SPBE)**  
Merupakan salah satu dari layanan publik yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
5. **Sistem Penghubung Layanan (TIK)**  
Dengan adanya aplikasi yang telah ada dan beragam, maka untuk keperluan berbagi data , maka diperlukan sebuah Sistem Penghubung Layanan yang dapat digunakan oleh setiap OPD yang membutuhkan layanan berbagi data dengan sistem dari OPD yang lain. Ataupun Sistem Penghubung Layanan ini dapat digunakan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
6. **Portal Data (TIK)**  
Membuat Portal Data yang menjadi satu satunya tempat untuk mendapatkan data strategis di Pemerintah daerah, dengan kesesuaian dengan Arsitektur Data SPBE.

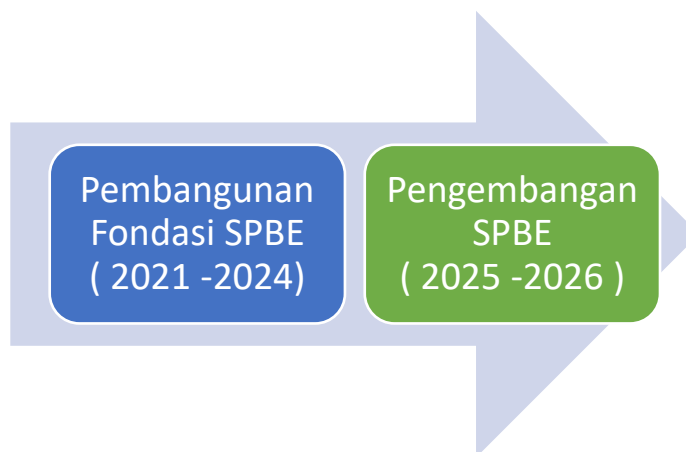
## BAB VII

### PETA RENCANA SPBE PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan analisis kesenjangan SPBE Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi Kesiapan SPBE tahun 2022 – 2024; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2025 – 2026.



**Gambar 16. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE**

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2022 - 2024 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, manajemen SPBE ,infrastruktur SPBE, SDM SPBE dan program unggulan /prioritas sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Sumatera Barat
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE ( Perda / Pergub )
4. Panduan / Pedoman Manajemen SPBE
5. Kapasitas SDM TIK ( Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah
7. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD)
8. Big Data dan Kecerdasan Buatan Provinsi Sumatera Barat

9. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2025 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Proses Evaluasi dan perbaikan diseluruh komponen SPBE
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE ( G2C, G2B,G2E,G2G) sesuai dengan kebutuhan pengguna
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Sumatera Barat, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2022 – 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Provinsi tahun 2022 – 2026 dapat dilihat di tabel

## 7.1. Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat ( 2022 – 2026 )

Tabel 19. Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat ( 2022 – 2026 )

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Sumatera Barat	1.1	Pembuatan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Sumatera Barat	Biro Organisasi dan Dinas Kominfo	✓			
		1.2	Pembuatan Dokumen Arsitektur Layanan Sumatera Barat	Biro Organisasi dan Dinas Kominfo	✓			
		1.3	Pembuatan Dokumen Arsitektur Data Sumatera Barat	Bappeda dan Dinas Kominfo	✓			
		1.4	Pembuatan Dokumen Arsitektur Aplikasi Sumatera Barat	Dinas Kominfo	✓			
		1.5	Pembuatan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Sumatera Barat	Dinas Kominfo	✓			
		1.6	Pembuatan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Sumatera Barat	Dinas Kominfo	✓			
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas	2.1	Pembentukan legalitas dan tupoksi Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat	Sekretariat Daerah	✓			

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
	Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat							
3	Penguatan Kebijakan SPBE	3.1	Penyusunan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat	Biro Organisasi, Biro Hukum dan Dinas Kominfo	✓			
		3.2	Penyusunan Perda / Pergub SPBE dengan ruang lingkup yang telah ditentukan	Biro Organisasi, Dinas Kominfo dan Biro Hukum	✓			
4	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE	4.1	Pembuatan Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Dinas Kominfo	✓			
		4.2	Pembuatan Pedoman Manajemen Data	Dinas Kominfo		✓		
		4.3	Pembuatan Pedoman Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo		✓		
		4.4	Pembuatan Pedoman Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfo		✓		
		4.5	Pembuatan Pedoman Manajemen Perubahan	Dinas Kominfo		✓		
		4.6	Pembuatan Pedoman Manajemen SDM	Dinas Kominfo	✓			



No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
		4.7	Pembuatan Pedoman Manajemen Keamanan SPBE	Dinas Kominfo	✓			
		4.8	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Dinas Kominfo		✓		
		4.9	Audit TIK Provinsi Sumatera Barat	Dinas Kominfo		✓	✓	✓
5	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE	5.1	Evaluasi Penerapan & Optimalisasi terhadap pengelolaan : risiko, keamanan, data, aset TIK, Pengetahuan, Perubahan, Layanan dan SDM	Inspektorat dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
6	Survey Pengguna SPBE	6.1	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan	Dinas Kominfo, Biro Organisasi	✓	✓	✓	✓
7	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	7.1	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pendidikan	Dinas Kominfo dan OPD terkait		✓	✓	✓
		7.2	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Kesehatan	Dinas Kominfo dan OPD terkait	✓	✓	✓	✓
		7.3	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Perijinan	Dinas Kominfo dan OPD terkait		✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
		7.4	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pariwisata	Dinas Kominfo dan OPD terkait	✓	✓	✓	✓
		7.5	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Ekonomi	Dinas Kominfo dan OPD terkait		✓	✓	✓
		7.6	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Informasi	Dinas Kominfo dan OPD terkait		✓	✓	✓
		7.7	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan UMKM	Dinas Kominfo dan OPD terkait	✓	✓	✓	✓
		7.8	Pengembangan Integrasi proses bisnis Layanan Pertanian	Dinas Kominfo dan OPD terkait	✓	✓	✓	✓
8	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	8.1	Pengembangan integrasi proses bisnis Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan	Bappeda , BPKAD, Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		8.2	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		8.3	Pengembangan integrasi proses bisnis Kepegawaian	BKD dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		8.4	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengarsipan	Dinas Arsipus dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
		8.5	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		8.6	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengawasan Pemerintah	Inspektorat dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		8.7	Pengembangan integrasi proses bisnis Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi	Setda dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		8.8	Pengembangan integrasi proses bisnis kinerja pegawai	BKD dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
9	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	9.1	Adanya portal pusat layanan <i>service desk</i> terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru serta pemenuhan SLA Layanan SPBE	Dinas Kominfo dan Biro Organisasi		✓	✓	✓
10	Pengembangan Pusat Data	10.1	Pengembangan pusat data dengan standar internasional <i>data center rated 3</i>	Dinas Kominfo		✓	✓	

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
11	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Sumatera Barat	11.1 Pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dengan FO	Dinas Kominfo	✓	✓			
		11.2 Pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar Kabupaten / Kota dengan Metro	Dinas Kominfo	✓	✓			
12	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	12.1 Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah / GSB Sumatera Barat	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
13	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Sumatera Barat	13.1 Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pembangunan Portal Data Daerah	14.1 Pengembangan portal data Sumatera Barat	Dinas Kominfo dan Bappeda	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	15.1 Sosialisasi <i>Security Awareness</i> ke seluruh ASN	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		15.2 Pembuatan Perimeter Security	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
		15.3	Pengamanan host server	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		15.4	Penerapan Enkripsi di seluruh aplikasi web dan transaksi	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
		15.5	Pembentukan <i>Incident Response Team</i>	Dinas Kominfo	✓			
		15.6	Melakukan VAPT ( vulnerability Assessment Penetration Testing ) secara reguler	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	16.1	Pembuatan Arsitektur Big Data	Dinas Kominfo			✓	
		16.2	Pembangunan Infrastruktur Big Data	Dinas Kominfo			✓	
		16.3	Pembuatan Tata Kelola Big Data	Dinas Kominfo			✓	
		16.4	Pembuatan Sistem Kecerdasan Buatan	Dinas Kominfo				✓
17	Asesmen SDM SPBE	17.1	Pelaksanaan asesmen SDM SPBE	BPSDM & Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
18	Pelatihan & Sertifikasi SDM SPBE	18.1	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Tata Kelola</b> , dengan Job	BPSDM & Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
		Role Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO						
		18.2 Melakukan Pelatihan & Sertifikasi <b><u>SDM Infrastruktur</u></b> , dengan Job Role Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist	BPSDM & Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		18.3 Melakukan Pelatihan & Sertifikasi <b><u>SDM Keamanan Informasi</u></b> , dengan Job Role Cyber Security Manager, Cyber Security Specialist, Operation Center Specialist	BPSDM & Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		18.4 Melakukan Pelatihan & Sertifikasi <b><u>SDM Pengembangan Aplikasi</u></b> , dengan Job Role Web Developer, System Analyst, Database Administrator	BPSDM & Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		18.5 Melakukan Pelatihan & Sertifikasi <b><u>SDM Big Data</u></b> , dengan Job Role Big Data Specialist, Data Specialist	BPSDM & Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis	Kegiatan	Penanggungjawab	2022	2023	2024	2025	2026
		18.6	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi <b>SDM Literasi Digital</b> , dengan Job Role Digital Skill ( Digital Worker ) untuk seluruh ASN	BPSDM & Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓
19	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	19.1	Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE	BKD	✓	✓	✓	✓
		19.2	Pola Remunerasi Bidang SPBE	BKD dan Setda		✓		
20	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah	20.1	Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo & Setda	✓	✓	✓	✓
21	Pembuatan Sistem Manajemen Pengetahuan	21.1	Pembuatan Sistem Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfo		✓		
		21.2	Sosialisasi Sistem Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfo		✓		
22	Pembuatan Sistem Manajemen Aset TIK	22.1	Pembuatan Sistem Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo		✓		
		22.2	Sosialisasi Sistem Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo		✓		

## BAB VIII

### DETAIL RENCANA PROYEK PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN SPBE

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Provinsi Sumatera Barat yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

#### *1.1. Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Provinsi Sumatera Barat*

<b>Kode Program</b>	1.1
<b>Nama Program</b>	Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Provinsi Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Biro Organisasi
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis</li> <li>• Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis</li> <li>• Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Bisnis</li> <li>• Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB</li> </ul>



Kode Program	1.1
	<p>19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.</li> <li>• Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik.</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat revidu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidu dan evaluasi Inovasi.</li> </ul>

### 1.2. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Sumatera Barat

Kode Program	1.2
<b>Nama Program</b>	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan</li> <li>• Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD revidu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bukti undangan rapat revidu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.</li> <li>• Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.</li> </ul>

### 1.3. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Provinsi Sumatera Barat

<b>Kode Program</b>	1.3
<b>Nama Program</b>	Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Provinsi Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Bappeda dan Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Data</li> <li>• Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Data Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD revidir/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Data Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bukti undangan rapat revidir dan evaluasi arsitektur data</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil revidir/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data.</li> <li>• Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.</li> </ul>

#### 1.4. Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Sumatera Barat

<b>Kode Program</b>	<b>1.4</b>
<b>Nama Program</b>	Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi</li> <li>• Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD revidir/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Aplikasi Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bukti undangan rapat revidir dan evaluasi arsitektur aplikasi</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil revidir/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> </ul>

### 1.5. Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat

<b>Kode Program</b>	<b>1.5</b>
<b>Nama Program</b>	Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur</li> <li>• Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD revidi/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bukti undangan rapat revidi dan evaluasi arsitektur infrastruktur</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil revidi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.</li> </ul>

## 1.6. Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Provinsi Sumatera Barat

<b>Kode Program</b>	1.6
<b>Nama Program</b>	Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Provinsi Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembangunan Arsitektur SPBE Provinsi Sumatera Barat
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo Bidang Komunikasi
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>• Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Provinsi Sumatera Barat</li> <li>• Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.</li> </ul>

### 2.1. Pembentukan legalitas dan tupoksi Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat

<b>Kode Program</b>	<b>2.1</b>
<b>Nama Program</b>	Pembentukan legalitas dan tupoksi Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Sekretariat Daerah
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Menentukan Tupoksi Tim</li> <li>• Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE</li> <li>• Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li> <li>• Menerbitkan SK Tim SPBE</li> <li>• Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi</li> <li>• Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• FGD revidi dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar</li> <li>• Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan revidi atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>

### 3.1. Penyusunan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat

<b>Kode Program</b>	<b>3.1</b>
<b>Nama Program</b>	Penyusunan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Penguatan Kebijakan SPBE
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Biro Organisasi, Dinas Kominfo dan Biro Hukum
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revidi kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD revidi dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dalam bentuk Perda/Pergub/SK Gubernur terkait Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait Tim Koordinasi SPBE Sumatera Barat.</li> </ul>

### 3.2. Penyusunan Perda / Pergub SPBE dengan ruang lingkup yang telah ditentukan

<b>Kode Program</b>	<b>3.2</b>
<b>Nama Program</b>	Penyusunan Perda / Pergub SPBE dengan ruang lingkup yang telah ditentukan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Penguatan Kebijakan SPBE
<b>Tahun</b>	2022
<b>Penanggungjawab</b>	Biro Organisasi, Dinas Kominfo dan Biro Hukum
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan revidi kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Pengoperasian Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD revidi dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dalam bentuk Perda /Pergub SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat.</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait SBPE.</li> </ul>



#### 4.1. Pembuatan Pedoman Manajemen Risiko SPBE

Kode Program	4.1
Nama Program	Pembuatan Pedoman Manajemen Risiko SPBE
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2022
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mereferensikan dari permenPAN Risiko SPBE</li> <li>• Melakukan Identifikasi Risiko SPBE</li> <li>• Melakukan Penilaian Risiko SPBE</li> <li>• Menentukan treatment risiko SPBE</li> <li>• Mendokumentasikan Risk register</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen Risiko</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.2. Pembuatan Pedoman Manajemen Data

Kode Program	4.2
Nama Program	Pembuatan Pedoman Manajemen Data
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo & Bappeda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referensi Peraturan Kepala Bappenas</li> <li>• Mengambil referensi dari Arsitektur Data</li> <li>• Menentukan Standar Data</li> <li>• Menentukan basis data</li> <li>• Menentukan Kualitas Data</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen data</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.3. Pembuatan Pedoman Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.3
Nama Program	Pembuatan Pedoman Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadopsi dari ISO manajemen aset</li> <li>• Melakukan Inventaris aset TIK</li> <li>• Menentukan kepemilikan aset</li> <li>• Menentukan status aset</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen Aset TIK</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.4. Pembuatan Pedoman Manajemen Pengetahuan

Kode Program	4.4
Nama Program	Pembuatan Pedoman Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan sumber pengetahuan (Dokumen dan Pengalaman Pegawai )</li> <li>• Menentukan fitur sistem manajemen pengetahuan ( kategori , pencarian , penambahan, pengubahan dan penghapusan )</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen Pengetahuan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.5. Pembuatan Pedoman Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Pembuatan Pedoman Manajemen Perubahan
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan mekanisme permintaan perubahan</li> <li>• Memastikan mekanisme persetujuan perubahan</li> <li>• Memastikan penerapan perubahan yang disetujui</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen Perubahan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.6. Pembuatan Pedoman Manajemen SDM

Kode Program	4.6
Nama Program	Pembuatan Pedoman Manajemen SDM
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2022
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan ketersediaan standar kompetensi SDM teknis SPBE</li> <li>• Memastikan proses asesmen ASN terhadap kompetensi</li> <li>• Memastikan proses pelatihan &amp; sertifikasi</li> <li>• Memastikan mekanisme Jabatan Fungsional</li> <li>• Memastikan model renumerasi SDM SPBE</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen SDM</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.7. Pembuatan Pedoman Manajemen Keamanan SPBE

Kode Program	4.7
Nama Program	Pembuatan Pedoman Manajemen Keamanan SPBE
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2022
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisa risiko ( identifikasi , penilaian, perlakuan )</li> <li>• Menentukan kendali atau kontrol</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen Keamanan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.8. Pedoman Manajemen Layanan SPBE

Kode Program	4.8
Nama Program	Pedoman Manajemen Layanan SPBE
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat daftar layanan SPBE</li> <li>• Membuat SLA layanan SPBE</li> <li>• Membuat mekanisme service desk</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman Manajemen Layanan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 4.9. Audit TIK Provinsi Sumatera Barat

Kode Program	4.9
Nama Program	Audit TIK Provinsi Sumatera Barat
Inisiatif Strategis	Pembuatan Pedoman Manajemen SPBE
Tahun	2023-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audit aplikasi</li> <li>• Melakukan audit infrastruktur</li> <li>• Melakukan audit keamanan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Audit TIK</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan terkait pedoman/panduan.</li> </ul>

#### 5.1. Evaluasi Penerapan & Optimalisasi terhadap pengelolaan : risiko, keamanan, data, aset TIK, Pengetahuan, Perubahan, Layanan dan SDM

Kode Program	5.1
Nama Program	Evaluasi Penerapan & Optimalisasi terhadap pengelolaan : risiko, keamanan, data, aset TIK, Pengetahuan, Perubahan, Layanan dan SDM
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Inspektorat dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pedoman manajemen tersedia</li> <li>• Memastikan tindakan dalam pedoman dilakukan dengan baik dan berorientasi pada hasil yang dicapai</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti telah melakukan evaluasi dengan cek list atau notulensi</li> </ul>

*6.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan*

Kode Program	6.1
<b>Nama Program</b>	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Survey Pengguna SPBE
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo, Biro Organisasi
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat metode survei ( elektronik atau manual )</li> <li>• Menentukan kuesioner survei</li> <li>• Mengumpulkan data</li> <li>• Melakukan analisa data hasil survei</li> <li>• Menampilkan hasil survei</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti survey dilakukan, baik dalam format kuesioner ataupun foto tinjauan lapangan</li> </ul>

*7.1. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pendidikan*

Kode Program	7.1
<b>Nama Program</b>	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pendidikan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
<b>Tahun</b>	2023-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo dan OPD terkait
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 7.2. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Kesehatan

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Kesehatan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 7.3. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Perijinan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Perijinan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2023-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>

#### 7.4. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pariwisata

Kode Program	7.4
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pariwisata
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>

#### 7.5. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Ekonomi

Kode Program	7.5
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Ekonomi
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2023-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 7.6. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Informasi

Kode Program	7.6
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Informasi
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2023-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 7.7. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan UMKM

Kode Program	7.7
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan UMKM
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>



### 7.7. Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pertanian

Kode Program	7.7
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Layanan Pertanian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Membuat single sign on layanan untuk pengguna</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 8.1. Pengembangan integrasi proses bisnis Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan

Kode Program	8.1
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 8.2. Pengembangan integrasi proses bisnis Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Program	8.2
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengadaan Barang dan Jasa
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	LPSE dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 8.3. Pengembangan integrasi proses bisnis Kepegawaian

Kode Program	8.3
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

#### 8.4. Pengembangan integrasi proses bisnis Pengarsipan

Kode Program	8.4
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengarsipan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Arsipus dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

#### 8.5. Pengembangan integrasi proses bisnis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode Program	8.5
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BPKAD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 8.6. Pengembangan integrasi proses bisnis Pengawasan Pemerintah

Kode Program	8.6
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Pengawasan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Inspektorat dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 8.7. Pengembangan integrasi proses bisnis Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi

Kode Program	8.7
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Setda dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 8.8. Pengembangan integrasi proses bisnis kinerja pegawai

Kode Program	8.8
Nama Program	Pengembangan integrasi proses bisnis kinerja pegawai
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil design integrasi yang terdapat dalam Arsitektur SPBE Nasional</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan lintas fungsi yang terkait</li> <li>• Merangkai aplikasi berbasis proses bisnis, baik menggunakan GSB atau penyatuan database</li> <li>• Atau langsung menggunakan aplikasi umum dari pemerintah pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi terintegrasi</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi integrasi</li> </ul>

### 9.1. Adanya portal pusat layanan service desk

Kode Program	9.1
Nama Program	Adanya portal pusat layanan service desk terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2023-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Biro Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadopsi Pedoman Manajemen Layanan yang telah ada</li> <li>• Membuat aplikasi service desk yang mampu menerima keluhan/ insiden /masalah terhadap penggunaan layanan SPBE</li> <li>• Terdapat Personel Service Desk yang memberikan respon cepat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot aplikasi service desk untuk layanan SPBE</li> <li>• Dokumentasi penggunaan aplikasi Service Desk</li> </ul>

## 10.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional data center rated 3

Kode Program	10.1
Nama Program	Pengembangan pusat data dengan standar internasional data center rated 3
Inisiatif Strategis	Pengembangan Pusat Data
Tahun	2023-2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<p>Mengembangkan Pusat Data (<i>Data Center</i>) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan asesmen <i>data center</i> berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional</li> <li>• Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen</li> <li>• Menyiapkan anggaran untuk program pembuatan</li> <li>• Studi Kelayakan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM</li> <li>• Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data.</li> <li>• Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja</li> <li>• Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data.</li> <li>• Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data</li> <li>• Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional.</li> <li>• FGD review dan evaluasi layanan pusat data</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil revidu dan telaahan</li> <li>• Melakukan sertifikasi internasional Rated 3 baik Design atau Constructed</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku".</li> <li>• Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data</li> <li>• Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja</li> <li>• Katalog layanan pusat data.</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data.</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat Data</li> <li>• Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data</li> <li>• Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data</li> </ul>

## 11.1. Pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dengan FO

Kode Program	11.1
Nama Program	Pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dengan FO
Inisiatif Strategis	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Sumatera Barat
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian integrasi infrastruktur daerah, untuk menentukan teknologi yang tepat (FO, Metro, VPN atau Wireless) untuk OPD Kecamatan yang belum terhubung</li> <li>• Membentuk DED integrasi infrastruktur</li> <li>• Memastikan anggaran implementasi</li> <li>• Implementasi integrasi infrastruktur berbasis kajian dan DED yang ada</li> <li>• Pemeliharaan infrastruktur jaringan</li> <li>• Penyediaan fasilitas backup jaringan</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan</li> <li>• Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i></li> <li>• Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain;</li> <li>• Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil revidi dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog layanan Jaringan Intra</li> <li>• Prosedur operasional layanan jaringan intra</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan</li> <li>• Katalog layanan Jaringan Intra</li> <li>• Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra</li> <li>• Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra.</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra</li> <li>• Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra</li> <li>• Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra</li> </ul>

## 11.2. Pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar Kabupaten / Kota dengan Metro

Kode Program	11.2
Nama Program	Pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar Kabupaten / Kota dengan Metro
Inisiatif Strategis	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Sumatera Barat
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian integrasi infrastruktur daerah, untuk menentukan teknologi yang tepat (FO, Metro, VPN atau Wireless) untuk OPD Kecamatan yang belum terhubung</li> <li>• Membentuk DED integrasi infrastruktur</li> <li>• Memastikan anggaran implementasi</li> <li>• Implementasi integrasi infrastruktur berbasis kajian dan DED yang ada</li> <li>• Pemeliharaan infrastruktur jaringan</li> <li>• Penyediaan fasilitas backup jaringan</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan</li> <li>• Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i></li> <li>• Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain;</li> <li>• Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil revidi dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog layanan Jaringan Intra</li> <li>• Prosedur operasional layanan jaringan intra</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan</li> <li>• Katalog layanan Jaringan Intra</li> <li>• Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra</li> <li>• Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra.</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra</li> <li>• Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra</li> <li>• Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra</li> </ul>



## 12.1. Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah / GSB Sumatera Barat

<b>Kode Program</b>	<b>12.1</b>
<b>Nama Program</b>	Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah / GSB Sumatera Barat
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan</li> <li>• Pembuatan dokumen desain API dan <i>microservices</i></li> <li>• Memastikan kebijakan integrasi dipahami</li> <li>• Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan</li> <li>• Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan.</li> <li>• Melakukan pengembangan API dan <i>microservices</i> layanan</li> <li>• Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reu dan telaahan</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal</li> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> </ul>

13.1. Tersedianya *bandwidth* yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	13.1
Nama Program	Tersedianya <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Sumatera Barat
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD</li> <li>• Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan</li> <li>• Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i></li> <li>• Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo</li> <li>• Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>)</li> <li>• Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penggunaan <i>bandwidth</i> secara sistem dan real di lapangan dengan screenshot</li> </ul>

## 14.1. Pengembangan portal data Sumatera Barat

Kode Program	14.1
Nama Program	Pengembangan portal data Sumatera Barat
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bappeda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan sumber data</li> <li>• Menentukan Struktur data</li> <li>• Menentukan metadata</li> <li>• Menerapkan <i>Data Security</i></li> <li>• Membangun Aplikasi Sistem Portal Data</li> <li>• Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data</li> <li>• Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.</li> <li>• Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data</li> <li>• Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data</li> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data</li> </ul>

### 15.1. Sosialisasi Security Awareness ke seluruh ASN

Kode Program	15.1
Nama Program	Sosialisasi Security Awareness ke seluruh ASN
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat media edukasi yang menyenangkan tentang keamanan untuk ASN</li> <li>• Memanfaatkan media pembelajaran online untuk mengedukasi</li> <li>• Menilai seberapa paham dan mengerti dengan sertifikasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kegiatan</li> </ul>

### 15.2. Pembuatan Perimeter Security

Kode Program	15.2
Nama Program	Pembuatan Perimeter Security
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadopsi dari analisa risiko yang ada</li> <li>• Menerapkan Firewall, IDS dan IPS pada sistem server yang ada</li> <li>• Melakukan monitoring keamanan melalui NOC ( Network Operation Center ) dan SOC ( Security Operation Center )</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi desain perimeter untuk server</li> </ul>

### 15.3. Pengamanan host server

Kode Program	15.3
Nama Program	Pengamanan host server
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadopsi dari analisa risiko yang ada</li> <li>• Menerapkan patch pada host dan tidak menggunakan konfigurasi standar pada server</li> <li>• Melakukan monitoring keamanan melalui NOC ( Network Operation Center ) dan SOC ( Security Operation Center )</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi desain keamanan untuk server</li> </ul>

#### 15.4. Penerapan Enkripsi di seluruh aplikasi web dan transaksi

Kode Program	15.4
Nama Program	Penerapan Enkripsi di seluruh aplikasi web dan transaksi
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapatkan CA ( Certificate Authority ) dari BSSN</li> <li>• Menerapkan CA untuk keperluan https, tanda tangan elektronik dan lainnya</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penggunaan enkripsi daerah</li> </ul>

#### 15.5. Pembentukan Incident Response Team

Kode Program	15.5
Nama Program	Pembentukan Incident Response Team
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2022
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim lintas OPD</li> <li>• Melakukan sosialisasi SOP Incident response team</li> <li>• Meningkatkan kapasitas tim</li> <li>• Menerapkan aplikasi penanganan insiden untuk analisa</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi tim</li> <li>• Dokumensi notulensi koordinasi</li> <li>• Daftar insiden yang ada</li> </ul>

#### 15.6. Melakukan VAPT ( vulnerability Assessment Penetration Testing ) secara reguler

Kode Program	15.6
Nama Program	Melakukan VAPT ( vulnerability Assessment Penetration Testing ) secara reguler
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk pihak ketiga atau melakukan sendiri VAPT</li> <li>• Menjalankan prosedur VAPT</li> <li>• Memilih ruang lingkup VAPT ( aplikasi / infrastruktur )</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil VAPT</li> </ul>

### 16.1. Pembuatan Arsitektur Big Data

Kode Program	16.1
Nama Program	Pembuatan Arsitektur Big Data
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan big data strategy</li> <li>• Menentukan big data capability</li> <li>• Menentukan big data roadmap</li> <li>• Menentukan big data change management</li> <li>• Menyusun Arsitektur Big Data dalam format daya layer</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Big Data</li> </ul>

### 16.2. Pembangunan Infrastruktur Big Data

Kode Program	16.2
Nama Program	Pembangunan Infrastruktur Big Data
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan infrastruktur sesuai arsitektur yang ada</li> <li>• Menyiapkan Server</li> <li>• Menyiapkan Storage</li> <li>• Menyiapkan jaringan</li> <li>• Menyiapkan software pendukung big data</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengembangan big data</li> </ul>

### 16.3. Pembuatan Tata Kelola Big Data

<b>Kode Program</b>	<b>16.3</b>
<b>Nama Program</b>	Pembuatan Tata Kelola Big Data
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
<b>Tahun</b>	2025
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan tim pengarah big data</li> <li>• Menentukan tim pelaksana big data</li> <li>• Menentukan proses perencanaan big data</li> <li>• Menentukan proses pengembangan big data</li> <li>• Menentukan proses operasional big data</li> <li>• Menentukan proses evaluasi big data</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen SOP Big Data</li> </ul>

### 16.4. Pembuatan Sistem Kecerdasan Buatan

<b>Kode Program</b>	<b>16.4</b>
<b>Nama Program</b>	Pembuatan Sistem Kecerdasaan Buatan
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
<b>Tahun</b>	2026
<b>Penanggungjawab</b>	Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan use case yang akan digunakan</li> <li>• Memastikan sumber data tersedia dalam big data</li> <li>• Menentukan algoritma Machine Learning yang sesuai use case</li> <li>• Membuat algoritma jika diperlukan</li> <li>• Membuat interface untuk menyampaikan hasil analisa dalam bentuk diagnosa atau prediksi</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Screenshot sistem AI</li> </ul>

### 17.1. Pelaksanaan asesmen SDM SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelaksanaan asesmen SDM SPBE
Inisiatif Strategis	Asesmen SDM SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BPSDM & Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat referensi dari standar kompetensi SDM SPBE</li> <li>• Melakukan asesmen dengan tertulis / praktek / interview</li> <li>• Membuat laporan hasil asesmen</li> <li>• Menentukan gap kompetensi yang dibutuhkan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hasil asesmen</li> </ul>

### 18.1. Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Tata Kelola , dengan Job Role Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO

Kode Program	18.1
Nama Program	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Tata Kelola , dengan Job Role Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO
Inisiatif Strategis	Pelatihan & Sertifikasi SDM SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BPSDM & Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilih lembaga pelatihan yang kredibel atau menggunakan Badan Diklat yang ada</li> <li>• Memilih topik yang sesuai dengan Job Role ( kumpulan kompetensi ) yang dibutuhkan</li> <li>• Memastikan metode pembelajaran yang terintegrasi ( sinkro dan asinkron )dengan berorientasi pada faktor “bisa”</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kegiatan pelatihan</li> </ul>



*18.2. Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Infrastruktur, dengan Job Role Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist*

Kode Program	18.2
Nama Program	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Infrastruktur, dengan Job Role Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist
Inisiatif Strategis	Pelatihan & Sertifikasi SDM SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BPSDM & Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilih lembaga pelatihan yang kredibel atau menggunakan Badan Diklat yang ada</li> <li>Memilih topik yang sesuai dengan Job Role ( kumpulan kompetensi ) yang dibutuhkan</li> <li>Memastikan metode pembelajaran yang terintegrasi ( sinkro dan asinkron ) dengan berorientasi pada faktor "bisa"</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi kegiatan pelatihan</li> </ul>

*18.3. Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Keamanan Informasi, dengan Job Role Cyber Security Manager, Cyber Security Specialist, Operation Center Specialist*

Kode Program	18.3
Nama Program	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Keamanan Informasi, dengan Job Role Cyber Security Manager, Cyber Security Specialist, Operation Center Specialist
Inisiatif Strategis	Pelatihan & Sertifikasi SDM SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BPSDM & Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilih lembaga pelatihan yang kredibel atau menggunakan Badan Diklat yang ada</li> <li>Memilih topik yang sesuai dengan Job Role ( kumpulan kompetensi ) yang dibutuhkan</li> <li>Memastikan metode pembelajaran yang terintegrasi ( sinkro dan asinkron ) dengan berorientasi pada faktor "bisa"</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi kegiatan pelatihan</li> </ul>

*18.4. Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Pengembangan Aplikasi , dengan Job Role Web Developer, System Analyst, Database Administrator*

Kode Program	18.4
Nama Program	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Pengembangan Aplikasi , dengan Job Role Web Developer, System Analyst, Database Administrator
Inisiatif Strategis	Pelatihan & Sertifikasi SDM SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BPSDM & Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilih lembaga pelatihan yang kredibel atau menggunakan Badan Diklat yang ada</li> <li>Memilih topik yang sesuai dengan Job Role ( kumpulan kompetensi ) yang dibutuhkan</li> <li>Memastikan metode pembelajaran yang terintegrasi ( sinkro dan asinkron )dengan berorientasi pada faktor “bisa”</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi kegiatan pelatihan</li> </ul>

*18.5. Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Big Data, dengan Job Role Big Data Specialist, Data Specialist*

Kode Program	18.5
Nama Program	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Big Data, dengan Job Role Big Data Specialist, Data Specialist
Inisiatif Strategis	Pelatihan & Sertifikasi SDM SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BPSDM & Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilih lembaga pelatihan yang kredibel atau menggunakan Badan Diklat yang ada</li> <li>Memilih topik yang sesuai dengan Job Role ( kumpulan kompetensi ) yang dibutuhkan</li> <li>Memastikan metode pembelajaran yang terintegrasi ( sinkro dan asinkron )dengan berorientasi pada faktor “bisa”</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi kegiatan pelatihan</li> </ul>

*18.6. Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Literasi Digital , dengan Job Role Digital Skill ( Digital Worker ) untuk seluruh ASN*

Kode Program	18.6
<b>Nama Program</b>	Melakukan Pelatihan & Sertifikasi SDM Literasi Digital , dengan Job Role Digital Skill ( Digital Worker ) untuk seluruh ASN
<b>Inisiatif Strategis</b>	Pelatihan & Sertifikasi SDM SPBE
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	BPSDM & Dinas Kominfo
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memilih lembaga pelatihan yang kredibel atau menggunakan Badan Diklat yang ada</li> <li>Memilih topik yang sesuai dengan Job Role ( kumpulan kompetensi ) yang dibutuhkan</li> <li>Memastikan metode pembelajaran yang terintegrasi ( sinkro dan asinkron ) dengan berorientasi pada faktor “bisa”</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi kegiatan pelatihan</li> </ul>

*19.1. Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE*

Kode Program	19.1
<b>Nama Program</b>	Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE
<b>Inisiatif Strategis</b>	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
<b>Tahun</b>	2022-2026
<b>Penanggungjawab</b>	BKD
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi tentang Jabatan Fungsional bidang TIK</li> <li>Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam Jabatan fungsional</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar pegawai Fungsional yang ada dalam bidang TIK</li> </ul>

*19.2. Pola Remunerasi Bidang SPBE*

Kode Program	19.2
<b>Nama Program</b>	Pola Remunerasi Bidang SPBE
<b>Inisiatif Strategis</b>	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
<b>Tahun</b>	2023
<b>Penanggungjawab</b>	BKD dan Setda
<b>Rincian Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi tentang Jabatan Fungsional bidang TIK</li> <li>Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam Jabatan fungsional</li> <li>Menentukan pola remunerasi</li> </ul>
<b>Data Dukung Penilaian Indeks SPBE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar pegawai Fungsional yang ada dalam bidang TIK</li> <li>Dokumentasi pola remunerasi</li> </ul>

### 20.1. Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	20.1
Nama Program	Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo & Setda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi SPBE di masyarakat</li> <li>Mengajak keterlibatan keberhasilan SPBE</li> <li>Melakukan forum diskusi rutin tentang SPBE dengan stakeholder</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notulensi koordinasi dalam forum kolaborasi</li> </ul>

### 21.1. Pembuatan Sistem Manajemen Pengetahuan

Kode Program	21.1
Nama Program	Pembuatan Sistem Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Pembuatan Sistem Manajemen Pengetahuan
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Design Sistem Manajemen Pengetahuan</li> <li>Mengadopsi pedoman manajemen pengetahuan</li> <li>Mengembangkan aplikasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi pengembangan aplikasi</li> </ul>

### 21.2. Sosialisasi Sistem Manajemen Pengetahuan

Kode Program	21.2
Nama Program	Sosialisasi Sistem Manajemen Pengetahuan
Inisiatif Strategis	Pembuatan Sistem Manajemen Pengetahuan
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi secara online atau offline</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi sosialisasi</li> </ul>

*22.1. Pembuatan Sistem Manajemen Aset TIK*

Kode Program	22.1
Nama Program	Pembuatan Sistem Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Pembuatan Sistem Manajemen Aset TIK
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Design Sistem Manajemen Aset</li> <li>• Mengadopsi pedoman manajemen aset</li> <li>• Mengembangkan aplikasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengembangan aplikasi</li> </ul>

*22.2. Sosialisasi Sistem Manajemen Aset TIK*

Kode Program	22.2
Nama Program	Sosialisasi Sistem Manajemen Aset TIK
Inisiatif Strategis	Pembuatan Sistem Manajemen Aset TIK
Tahun	2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi secara online atau offline</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi sosialisasi</li> </ul>

## BAB IX

### PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sumatera Barat . Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Provinsi Sumatera Barat sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Provinsi Sumatera Barat, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Provinsi Sumatera Barat meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Provinsi Sumatera Barat meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Provinsi Sumatera Barat harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Provinsi Sumatera Barat yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

